

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN DASAR  
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**STRATEGI PENGUATAN KAPASITAS *STAKEHOLDERS*  
DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BAHARI  
MELALUI TEKNIK *ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS*  
(STUDI PADA OBJEK WISATA BAHARI KAB. LAMPUNG SELATAN)**

**Ketua:**

**Ita Prihantika, S.Sos., M.A              NIDN 0230068401              SINTA ID 6041851**

**Anggota:**

**Dewie Brima Atika, S.I.P., M.Si      NIDN 0012128402              SINTA ID 6149219**

**Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si    NIDN 0022017101              SINTA ID 6132716**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2021**

## HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN DASAR UNIVERISTAS LAMPUNG

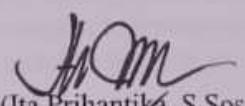
Judul Penelitian	: Strategi Penguatan <i>Stakeholders</i> dalam Pengembangan Pariwisata Bahari melalui Teknik <i>Analytical Hierarchy Process</i> (Studi pada Objek Wisata Bahari Kab. Lampung Selatan)
Manfaat sosial ekonomi	: Teridentifikasinya strategi dalam penguatan stakeholder dalam pengembangan pariwisata bahari
Ketua Peneliti	
a. Nama Lengkap	: Ita Prihantika, S.Sos. MA
b. SINTA ID	: 6041851
c. Jabatan Fungsional	: Asisten Ahli
d. Program Studi	: Administrasi Negara
e. Nomor HP	: 0856 127 5145
f. Alamat surel (e-mail)	: itaprihantika@fisip.unila.ac.id
Anggota Peneliti (1)	
a. Nama Lengkap	: Dewie Brima Atika, S.I.P., M.Si
b. SINTA ID	: 6149219
c. Program Studi	: Administrasi Negara
Anggota Peneliti (2)	
a. Nama Lengkap	: Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si
b. SINTA ID	: 6132716
c. Program Studi	: Administrasi Negara
Jumlah mahasiswa yang terlibat	
	: 1. Bella Meika Lestari (1716041010) 2. Muhammad Iqbal Rahmawan (1816041035) 3. Anada Sofira (1946041005)
Jumlah alumni yang terlibat	: Tia Panca Rahmadhani, S.Hub.I
Jumlah staf yang terlibat	: 1 orang
Lokasi kegiatan	: Kabupaten Lampung Selatan
Lama kegiatan	: 6 bulan
Biaya Penelitian	: Rp 20.000.000,00
Sumber dana	: Universitas Lampung

Mengetahui,  
Dekan FISIP UNILA



(Dra. Ida Nurhaida, M.Si)  
NIP 196108071987032001

Bandar Lampung, September 2021  
Ketua Peneliti,

  
(Ita Prihantika, S.Sos. MA)  
NIP 1974052020011222002

Menyetujui,  
Ketua LPPM Universitas Lampung,



(Dr. Luqman Afriani, D.E.A.)  
NIP 196505101993032008

## RINGKASAN

Sektor pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan khususnya wisata bahari mempunyai prospek yang cukup menjanjikan namun tingkat kunjungan wisatawan terutama wisatawan mancanegara masih rendah. Berbagai upaya pengembangan pariwisata bahari dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mengenalkan potensi wisata tersebut maupun untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara namun baru – baru ini pada Desember 2018 bencana alam tsunami telah menghancurkan sebagian destinasi wisata bahari di sepanjang garis pantai kabupaten Lampung Selatan. Keterpurukan sektor wisata bahari pasca tsunami harus segera dipulihkan dan tidak boleh berlarut-larut, berbagai cara harus dilakukan untuk memulihkan kembali dan membangkitkan sektor pariwisata tersebut. Aktivitas ini harus melibatkan semua pihak para pemangku kepentingan/stakeholders dalam industri pariwisata dengan memperhatikan pengambilan keputusan prioritas utama untuk pengembangan wisata bahari di kabupaten Lampung Selatan. Luaran utama penelitian ini yaitu (1) Artikel yang dimuat pada prodising internasional terindeks Scopus (2) mempresentasikan artikel pada seminar internasional , dan (3) mempresentasikan artikel pada seminar nasional.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik *scoping review*. Berdasarkan hasil identifikasi stakeholder menunjukkan bahwa masing-masing stakeholder masih menjalankan fungsi dan perannya secara terpisah, baik stakeholder kunci, stakeholder utama/ primer maupun stakeholder pendukung/ sekunder. Untuk itu diperlukan kerjasama dan koordinasi antar stakeholder dengan melakukan pengelolaan yang bersifat kolaboratif (*collaboratif management*) dengan memadukan semua stakeholders yang terlibat meliputi masyarakat lokal, komunits masyarakat, pemerintah, swasta/ pebisnis dan akademisi.

Kolaborasi yang dibangun dengan keterkaitan antar stakeholder dalam pengembangan wisata bahari dimulai dari tahapan perencanaan sampai pembangunan pariwisata berkelanjutan. Peran masing-masing stakeholder, selalu berupaya melakukan yang terbaik bagi pengembangan pariwisata yang berdampak bagi masyarakat. Keterlibatan masyarakat lokal merupakan upaya untuk memelihara budaya dan SDA yang sudah ada dalam kehidupan dimasyarakat lokal. Mengoptimalkan kolaborasi dalam pengembangan wisata bahari, dapat dilakukan dengan peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder yang terlibat; penguatan kapasitas kelembagaan bagi dinas maupun lembaga teknis yang memiliki peran dalam pengembangan dan promosi wisata bahari.

Keywords: penguatan kapasitas, stakeholder, pariwisata, bencana alam, *Analytical Hierarchy Process*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
RINGKASAN.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	4
1.1    Latar Belakang .....	4
1.2    Tujuan Khusus .....	5
1.3    Urgensi Penelitian .....	5
1.4    Keterbatasan Penelitian.....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. <i>State of The Art</i> .....	7
2.2.    Tinjauan Pariwisata.....	8
2.2.    Kapasitas Stakeholders Pengelola Pariwisata.....	9
2.3.    Road Map Penelitian.....	10
BAB 3. METODE PENELITIAN .....	13
3.1    Desain Penelitian .....	13
3.3    Bagan Alir Penelitian.....	17
3.4    Luaran dan Target Capaian.....	18
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	19
4.1    Gambaran Umum Kabupaten Lampung Selatan .....	19
4.2    Potensi Wisata Pantai di Lampung Selatan .....	23
4.3    Stakeholders yang Terlibat dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan .....	38
4.4    Peran Stakeholders dalam Pengelolaan Pariwisata di Indonesia .....	48
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN .....	59
5.1    Simpulan .....	59
5.2    Saran .....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN .....	63

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan aktivitas seseorang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan untuk sekedar menghilangkan rasa penat dari aktivitas sehari-hari atau yang biasa disebut dengan refleshing. Bagi sebagian masyarakat, kebutuhan akan pariwisata saat ini telah dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer atau utama. Pariwisata senantiasa berkembang secara dinamis seiring dengan perubahan lingkungan strategis, baik yang secara lokal maupun global. Daya tarik dari beberapa objek wisata di suatu daerah juga menjadi salah satu alasan masyarakat untuk melakukan kegiatan pariwisata baik itu karena keindahan alam, fasilitas objek wisata, maupun kebudayaannya.

Pengembangan kepariwisataan tidak terlepas dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab semua pihak para stakeholders/pemangku kepentingan tentang pentingnya mengembangkan pariwisata. Dalam melaksanakan konsep pengembangan wisata tentunya diperlukan partisipasi yang cukup baik dari para stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata. Hubungan antar organisasi, kolaborasi dan kerjasama dalam pengelolaan pariwisata merupakan suatu hal yang penting (Lovelock, 2003 dalam Scoot, 2008). Hal ini merujuk pada sumber daya yang dimiliki aktor mikro tidak dapat memenuhi pembangunan yang berkelanjutan jika berada dalam keadaan terisolasi (Halme, 2001 dalam Scoot, 2008). Pelaksanaan pengelolaan pariwisata tentunya tidak dapat terlaksana apabila para stakeholder yang terlibat ini tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan mengembangkannya. Dengan banyaknya kepentingan yang dimiliki oleh stakeholder yang terlibat, maka diperlukan kerjasama yang kuat antara para stakeholder tersebut.

Sektor pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan khususnya wisata bahari mempunyai prospek yang cukup menjanjikan. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata kabupaten Lampung Selatan, jumlah kunjungan wisatawan 235.021 pada tahun 2015 sedangkan tahun sebelumnya hanya 149.765. Dari data ini menunjukkan adanya peningkatan tetapi 90% merupakan wisatawan lokal. Berbagai upaya pengembangan pariwisata bahari dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mengenalkan potensi wisata tersebut maupun untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik lokal

maupun mancanegara. Namun pada Desember 2018 bencana alam tsunami telah menghancurkan sebagian destinasi wisata bahari di sepanjang garis pantai kabupaten Lampung Selatan. Keterpurukan sektor wisata bahari pasca tsunami harus segera dipulihkan dan tidak boleh berlarut-larut, berbagai cara harus dilakukan untuk memulihkan kembali dan membangkitkan sektor pariwisata tersebut. Aktivitas ini harus melibatkan semua pihak para pemangku kepentingan/stakeholders dalam industri pariwisata dengan memperhatikan pengambilan keputusan prioritas utama untuk pengembangan wisata bahari di kabupaten Lampung Selatan.

## **1.2 Tujuan Khusus**

Penelitian Strategi penguatan kapasitas stakeholders dalam pengembangan pariwisata pasca bencana ini mempunyai tujuan khusus untuk:

- (1) Mengidentifikasi sumber daya dalam menjalankan serta mengelola program pengembangan pariwisata pasca bencana.
- (2) Menentukan stakeholders kunci dan peran stakeholders yang terlibat dalam pengembanganpariwisata pasca bencana.
- (3) Mengukur kapasitas jejaring stakeholders melalui domain pengembangan jejaring kerjasama pengembangan pariwisata pasca bencana.
- (4) Menganalisis faktor pendukung kapasitas yang dibutuhkan dan perlu dikembangkan untuk menunjang pengembangan pariwisata pasca bencana.
- (5) Menentukan skala prioritas pengambilan keputusan untuk pengembangan pariwisata pasca bencana.

## **1.3 Urgensi Penelitian**

Dalam pengembangan pariwisata, selama ini pengelolaan sumberdaya sering mendapatkan sorotan yakni fenomena termaginalakkannya masyarakat lokal untuk memproleh manfaat dari sumberdaya yang ada didestinasi wisata. Untuk itu, agar terjamin implementasi pariwisata berbasis masyarakat pada destinasi wisata,diperlukan upaya untuk mengedepankan peran serta dan tanggungjawab masyarakat setempat. Masyarakat sebagai salah satu stakeholders harus dilibatkan dalam pengelolaan berbagai sumber daya pariwisata diwilayah mereka. Menurut Ascherson (2000) masyarakat lokal memiliki hak azasi untuk menginterpretasikan dan mengelola sumberdaya yang mereka miliki. Kearifan lokal dan lembaga tradisional yang berkembang dimasyarakat bersangkutan dalam pengelolaan sumberdaya harus tetap dipelihara dan dilibatkan. Pemerintah ataupun instansi yang

berwenang berperan sebagai fasilitator dalam pengelolaan sumberdaya budaya yang ada didestinasi wisata

Selama ini telah banyak kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengembangkan industri pariwisata namun demikian masing-masing kebijakan tersebut terlihat belum efektif. Indikator yang mudah diukur adalah masih belum maksimalnya kunjungan wisatawan di daerah tujuan wisata. Meskipun secara nasional data kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara (winus) maupun wisatawan mancanegara (wisman) mengalami peningkatan tetapi ada beberapa daerah yang industri pariwisatanya masih belum berkembang seperti di lokasi penelitian ini yaitu kabupaten Lampung Selatan, terlebih lagi setelah peristiwa bencana tsunami pada periode Desember 2018 yang menghancurkan lokasi wisata bahari terutama yang terparah di kecamatan Kalianda yang merupakan lokasi penelitian ini. Korban nyawa dan harta benda serta sebagian besar fasilitas umum di lokasi wisata telah terdata. Memulihkan trauma masyarakat korban bencana di daerah wisata serta infrastruktur yang rusak parah perlu sinergi berbagai pihak para stakeholders pengelola pariwisata agar industri pariwisata dan keberlanjutannya dapat diteruskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah tersebut.

#### **1.4 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini mengalami beberapa modifikasi dalam desain penelitiannya. Tim peneliti menggunakan teknik studi literatur, yaitu scoping review karena ketebatasan dalam pengumpulan data diakibatkan pandemi Covid -19.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. *State of The Art*

Kajian tentang pariwisata selalu menarik untuk dibahas, baik dalam konteks strategi pengembangan wisata, peran stakeholder dan berbagai macam faktor penghambat dan pendorong. Kajian khusus upaya mengembangkan wisata bahari di Kabupaten Lampung telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Masyano dan Suhada (2015), Sulistiowati dkk (2016), Kagungan dan Yulianti (2019), Pramanda (2019), Hermawan dan Hutagalung (2019) dan Sulistiowati dkk (2020). Keenam peneliti ini dipilih karena memiliki kesamaan dalam fokus penelitian wisata bahari yang mereka lakukan, yaitu menyoroti dinamika stakeholders yang terlibat dalam pengembangan wisata bahari di Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan.

Masyano dan Suhada (2015) merekomendasikan pengembangan sektor unggulan pariwisata di Lampung Timur akan berjalan jika kerjasama dengan swasta dan keswadayaan (masyarakat) dilakukan maksimal oleh pemerintah daerah. Sulistiowati dkk (2016) dalam artikelnya menuliskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tidak memiliki strategi khusus untuk mengembangkan pariwisata dalam menghadapi menghadapi tantangan global. Kagungan dan Yulianti (2019) mengidentifikasi kegagalan pengembangan wisata di Pulau Pisang karena kurangnya sinergitas antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Sedangkan Pramanda (2019) berpendapat meskipun Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan, untuk itu diperlukan partisipasi dan dukungan dari masyarakat setempat bersama dengan pihak pemerintah maupun stakeholder. Hermawan dan Hutagalung (2019) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata belum sepenuhnya otonom, dalam artian pemerintah daerah masih perlu menggerakkan dan mendorong masyarakat agar berpartisipasi dalam merumsuskan konsep dan ide pengembangan pariwisata. Penelitian terakhir dari Sulistiowati dkk (2020) telah mampu mengidentifikasi 12 stakeholders yang terlibat dalam perkembangan pariwisata di Kabupaten Lampung selatan yang terbagi dalam empat martrik, yaitu *key player, subject, context setter* dan *crowd*. Namun keenam penelitian ini berhenti sebatas mengidentifikasi stakeholder yang terlibat namun belum mampu memberikan jalan keluar bagaimana stakeholders tersebut dikembangkan kapasitasnya

sehingga mampu mengembangkan pariwisata dimana mereka berkecimpung. Untuk itu, penelitian ini penting dilakukan karena akan menghasilkan alternatif pengembangan kapastitas stakeholder pariwisata di Lampung Selatan.

## 2.2. Tinjauan Pariwisata

Pariwisata berarti perjalanan atau berpergian yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling. Mc. Intosh dan Goelder dalam Hadiwijoyo (2012:40) mengungkapkan bahwa pariwisata adalah ilmu atau seni dan bisnis yang dapat menarik dan menghimpun pengunjung termasuk didalamnya berbagai akomodasi dan *catering* yang dibutuhkan dan diminati oleh pengunjung. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan, WTO (*World Tourism Organization*) dalam A.J Muljadi (2009:9) mendefinisikan pariwisata sebagai berbagai aktivitas yang dilakukan orang-orang yang mengadakan perjalanan untuk dan tinggal di luar kebiasaan lingkungannya dan tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk kesenangan, bisnis, dan keperluan lain.

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, bahwa yang dapat dijadikan objek dan daya tarik wisata berupa keadaan alam, flora dan fauna, hasil karya manusia, serta peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan model bagi perkembangan dan peningkatan kepariwisataan di Indonesia. Obyek dan daya tarik wisata menurut Hadiwijoyo (2012:49) dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu: Obyek Wisata Alam, Obyek Wisata Sosial Budaya, Obyek Wisata Minat Khusus

Sementara itu mengenai pengembangan pariwisata, Munasef dalam Hadiwijoyo (2012:57) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata merupakan segala kegiatan dan usaha yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, menyediakan semua sarana dan prasarana, barang dan jasa, fasilitas yang diperlukan guna melayani kebutuhan wisatawan. Marpaung dalam Hadiwijoyo (2012:58) menyatakan bahwa hal yang diperhatikan dalam pengembangan suatu daya tarik wisata yang potensial harus dilakukan penelitian, inventarisasi dan evaluasi sebelum fasilitas wisata dikembangkan. Hal ini penting agar perkembangan daya tarik wisata yang ada dapat sesuai dengan keinginan pasar potensial dan untuk menentukan pengembangan yang tepat dan sesuai.

Sedangkan menurut Muljadi (2009:32), untuk mewujudkan pembangunan pariwisata harus diperhatikan hal-hal, sebagai berikut:

- 1) Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya
- 2) Nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dsn nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
- 3) Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup
- 4) Kelanjutan dan usaha pariwisata itu sendiri.

Terkait dengan hal tersebut, Yoeti dalam Hadiwijoyo (2012:58) menyebutkan terdapat 3 (tiga) faktor yang dapat menentukan keberhasilan pengembangan pariwisata sebagai suatu industri. Ketiga faktor tersebut adalah tersedianya objek atraksi wisata, adanya fasilitas aksesibilitas, dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat.

## **2.2. Kapasitas Stakeholders Pengelola Pariwisata**

Secara umum pendefinisian kapasitas stakeholder dapat dibagi berdasarkan kata “stakeholder” dan “kapasitas”. Freeman (1984) mendefinisikan stakeholder sebagai berbagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian dari tujuan suatu organisasi atau jaringan. Sementara capacity atau kapasitas terdiri dari dua hal yaitu containing dan ability, baik dari pemikiran maupun tindakan. Secara umum kapasitas stakeholder merupakan sesuatu yang dapat membuat suatu jaringan “bekerja” dan dapat membuat suatu stakeholder tersebut itu berfungsi dengan baik atau berkerja sesuai dengan fungsinya.

Pada dasarnya kapasitas stakeholder tidak terlalu berbeda dengan kapasitas komunitas, karena stakeholder itu sendiri merupakan komunitas yang memiliki pengaruh dan dipengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan dan dapat dikategorikan pada kelompok yang sama. Tidak berbeda dengan Chaskin (2001) yang menyatakan bahwa kapasitas komunitas merupakan interaksi dari modal manusia, sumberdaya organisasi, dan modal sosial yang terdapat di dalam komunitas yang dapat berpengaruh dalam pemecahan permasalahan kolektif dan meningkatkan serta menjaga kesejahteraan komunitas. Kapasitas komunitas dapat bekerja di dalam proses sosial secara informal maupun usaha yang terorganisir baik oleh individu, organisasi, dan jejaring sosial yang terdapat di dalam dan di antara komunitas tersebut serta pada sistem yang lebih luas dimana komunitas tersebut menjadi bagiannya.

Pengelolaan pariwisata tentu saja melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dengan berbagai peran yang dimilikinya. Berbagai kelompok maupun organisasi ikut serta mendukung pengelolaan pariwisata dengan berbagai potensi yang dimiliki. Enam kelompok stakeholder utama yang dapat mempengaruhi pola pengembangan dan kebijakan pariwisata dalam kawasan dengan keanekaragaman hayati yang signifikan secara global (Dawyer dan Edwards, 2000) adalah sebagai berikut: (a).Sektor publik (badan pemerintahan lokal, nasional, regional, dan global); (b).Sektor privat; (c).Lembaga donor bilateral dan multilateral; (d).Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); (e).Komunitas lokal dan penduduk terasing; dan (f).Konsumen.

Sementara Damanik (2006) mendefinisikan stakeholder pariwisata sebagai berikut: (a). Sektor Industri, (b).Sektor Publik, (c).Organisasi Non Pemerintah, (d).Lembaga-Lembaga Donor Internasional.Lembaga-Lembaga Penelitian, (f).Wisatawan, (g).Masyarakat Setempat.

### **2.3. Road Map Penelitian**

Beberapa penelitian yang relevan dengan riset ini sebelumnya adalah penelitian dari Eka Ariyanti, Sulistiowati, Atika (2015) tentang Pembangunan Kepariwisataan Berbasis Masyarakat di Lampung Selatan yang ditinjau dari sisi efektifitas kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Hasil risetnya menunjukkan bahwa Pokdarwis belum berperan maksimal sebagai wadah melibatkan masyarakat dalam kegiatan pariwisata di lokasi penelitian ini sehingga perlu ada upaya-upaya untuk lebih melibatkan masyarakat dalam kegiatan pariwisata di kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya dilakukan riset lebih lanjut tentang upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pariwisata di kabupaten Lampung Selatan.

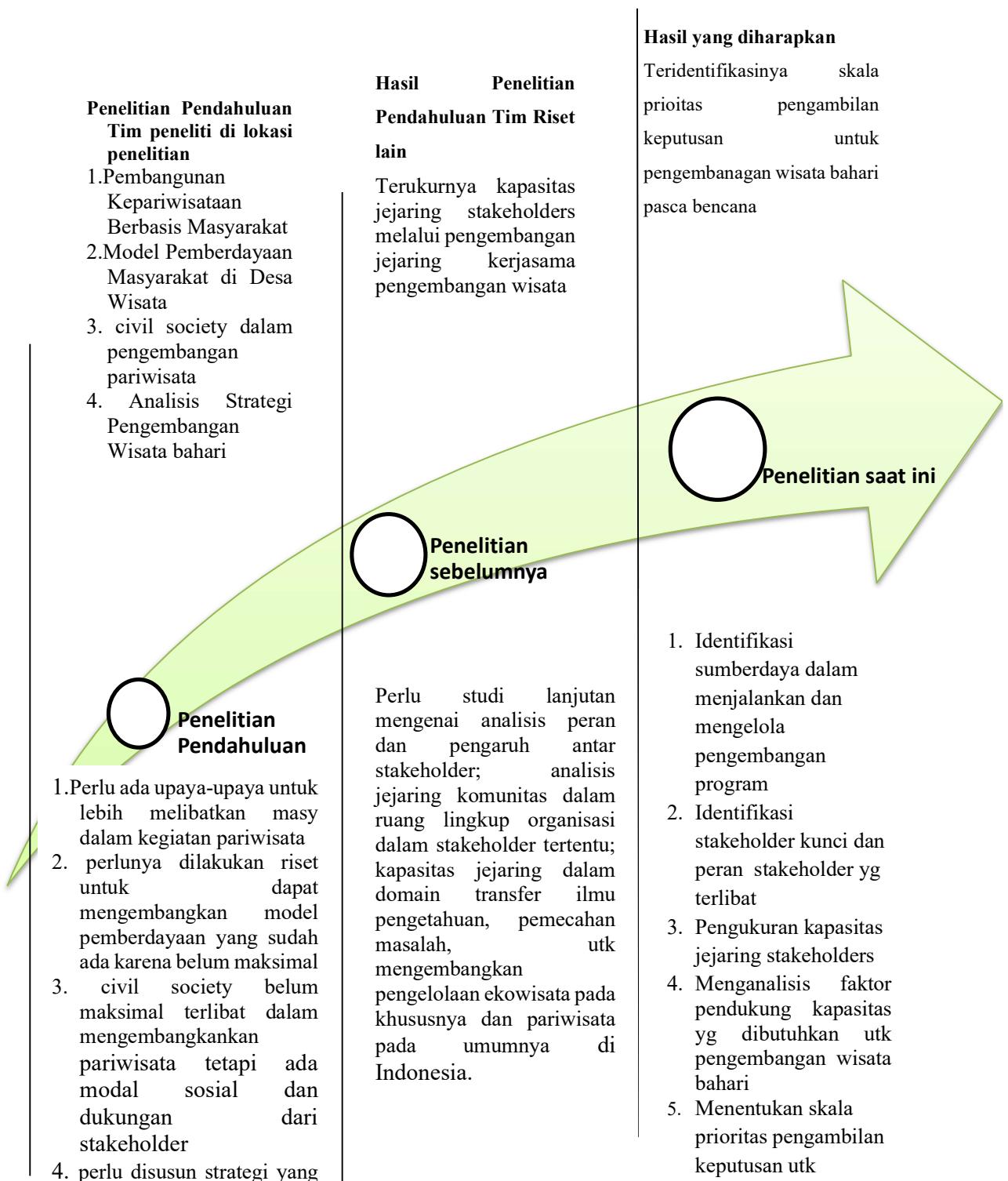
Selanjutnya riset dari Fatimaningsih, Sulistiowati, Atika (2016) tentang Model Pemberdayaan Masyarakat di Desa Wisata Kabupaten Lampung Selatan yang menghasilkan rekomendasi tentang perlunya dilakukan riset berikutnya untuk dapat mengembangkan model pemberdayaan yang sudah ada karena belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masih tentang masalah pariwisata, riset dari Kusumadewi, Sulistiowati,dan Atika (2017) tentang keterlibatan civil society dalam pengembangan pariwisata di kabupaten Lampung Selatan menunjukkan bahwa civil society belum maksimal terlibat dalam mengembangkan pariwisata tetapi ada modal sosial dan dukungan dari stakeholder serta perlu dilakukan riset tentang dukungan stakeholder tersebut dalam pengembangan pariwisata di wilayah yang bersangkutan. Dan selanjutnya penelitian

tentang Stategi Pengembangan Wisata bahari di Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan oleh, Nurhusainita, Sulistiowati, Atika (2017) yang salah satu hasil temuannya menyatakan bahwa Dinas Pariwisata kabupaten Lamsel belum maksimal menyusun dan menerapkan strategi untuk mengembangkan pariwisata khususnya wisata bahari sehingga perlu disusun strategi yang lebih memperhatikan lingkungan internal dan eksternal, memanfaatkan peluang dan melibatkan stakeholder serta masyarakat pada umumnya untuk mengembangkan wisata bahari.

Terkait dengan riset tentang penguatan kapasitas pengelola ekowisata di Jawabarat oleh Pamungkas (2013), direkomendasikan bahwa perlu studi lanjutan di antaranya adalah penelitian mengenai analisis peran dan pengaruh antar stakeholder; analisis jejaring komunitas dalam ruang lingkup orgraniasi dalam stakeholder tertentu; kapasitas jejaring dalam domain transfer ilmu pengetahuan, pemecahan masalah, maupun pengembangan infrastruktur di lokasi penelitian tersebut atau juga di wilayah lain agar dapat mengembangkan pengelolaan ekowisata pada khususnya dan pariwisata pada umumnya di Indonesia. Sementara itu

Seperti yang telah disampaikan bahwa telah terjadi bencana tsunami pada bulan Desember 2018 bencana alam tsunami telah menghancurkan sebagian destinasi wisata bahari di sepanjang garis pantai kabupaten Lampung Selatan. Keterpurukan sektor wisata bahari pasca tsunami harus segera dipulihkan dan tidak boleh berlarut-larut, berbagai cara harus dilakukan untuk memulihkan kembali dan membangkitkan sektor pariwisata tersebut. Aktivitas ini harus melibatkan semua pihak para pemangku kepentingan/stakeholders dalam industri pariwisata dengan memperhatikan pengambilan keputusan prioritas utama untuk pengembangan wisata bahari di kabupaten Lampung Selatan. Untuk membantu memulihkan wisata bahari inilah salah satunya dengan melakukan riset tentang penguatan kapasitas stakeholder dalam pengembangan wisata bahari pasca bencana di kabupaten Lampung Selatan. Dengan demikian roadmap penelitian ini tergambar sebagai berikut:

Gambar 1. Roadmap Penelitian



## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan kualitatif, dimana menggunakan Teknik *scoping review*, metode yang digunakan untuk mengidentifikasi literatur secara mendalam dan menyeluruh yang diperoleh dari berbagai sumber yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Menurut Arksey dan O'Malley, *scoping review* terdiri dari lima tahap yaitu: mengidentifikasi pertanyaan penelitian, mengidentifikasi studi yang relevan, pemilihan studi, memetakan data, meringkas dan melaporkan hasil yang digunakan dalam studi ini (Farwati dkk, 2021).

#### *Identifikasi Pertanyaan Penelitian*

*Review* ini difokuskan untuk mengetahui “Peran stakeholder dalam pengembangan wisata bahari” di Indonesia yang bertujuan untuk mengelompokan literatur pada topik tersebut dan mengidentifikasi konsep- konsep kunci, kesenjangan *scoping review* dan memetakan bukti yang digunakan untuk menginformasikan praktik dan kebijakan tentang peranan stakholder. Pertanyaan penelitian yang digunakan untuk memfokuskan pencarian literatur adalah:

1. Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam pengembangan wisata bahari di Indonesia?
2. Apa saja peran yang dilakukan stakeholder dalam pengembangan wisata bahari di Indonesia?
3. Di provinsi mana saja di Indonesia penelitian peran staleholder dalam pengembangan wisata bahari dilakukan?

Untuk mengembangkan fokus *review* dan strategi pencarian peneliti menggunakan *Framework Population, Intervention, Comparation, Outcome* dan *Study design* (PICOS) dalam mengelola dan memecahkan fokus *review*. Fokus pencarian artikel adalah penelitian kualitatif, sehingga penggunaan PICO(S) dinilai tepat untuk membantu mengidentifikasi konsep-konsep kunci dalam fokus *review* dan mengembangkan istilah pencarian yang sesuai untuk menggambarkan permasalahan dalam *review* ini. Pemetaan konsep-konsep kunci menggunakan Framework PICO(S) adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel 1. Framework PICO(S)

<b>Population and Problem</b>	Stakeholder, Pemangku Kepentingan
<b>Intervention</b>	Wisata Bahari
<b>Comparation</b>	Pengembangan, Pemanfaatan, Pembangunan
<b>Outcome</b>	Peran
<b>Study Design</b>	Semua artikel yang berkaitan dengan Peran Stakeholder dalam Pengembangan Wisata Bahari

### ***Identifikasi Studi yang Relevan***

Mengidentifikasi studi yang relevan dengan topik penelitian yang diambil dan menggunakan database *google scholar* untuk mengindeks literatur yang berkaitan dengan penelitian, mencari literatur sampai jenuh untuk menjaga kualitas literatur yang akan diambil dan memilimalkisir terjadinya kesalahan informasi yang didapatkan. Untuk pemilihan studi ditetapkan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi.

Tabel 2. Kriteria Inklusi Dan Eksklusi *Scoping Review*

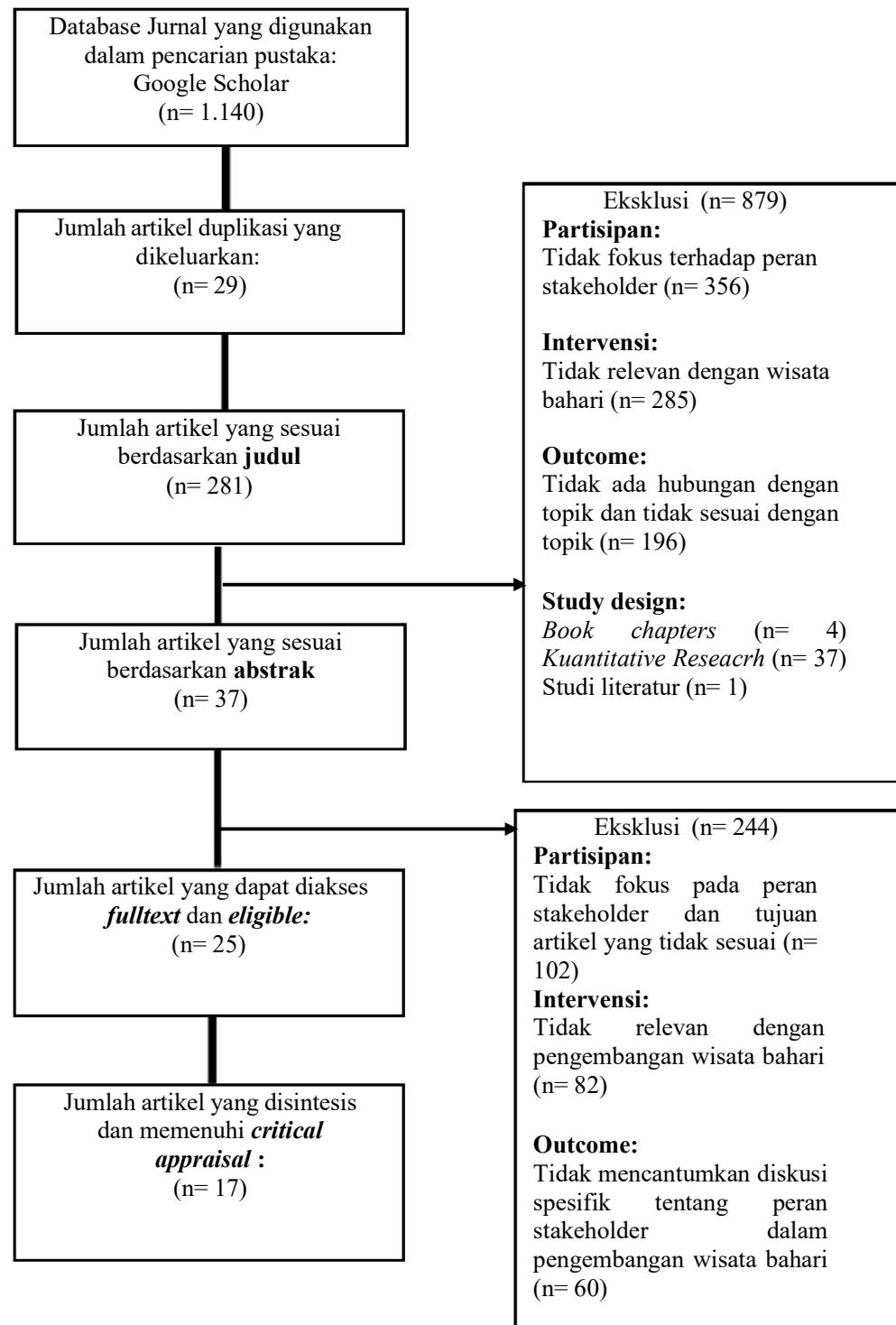
Kriteria	Inklusi	Eksklusi
<b>Population and Problem</b>	Stakeholder yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan wisata bahari	Pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan dalam pelaksanaan wisata bahari
<b>Intervention</b>	Wisata Bahari yang ada di Indonesia	Wisata Bahari selain di Indonesia
<b>Comparation</b>	Pengembangan yang dilakukan dalam pengelolaan wisata bahari	Pengembangan yang dilakukan selain dalam pengelolaan wisata bahari
<b>Outcome and Themes</b>	Peran yang dilakukan stakeholder dalam pengembangan wisata bahari	Peran yang dilakukan stakeholder, selain pada pengembangan wisata bahari
<b>Study Design and Publication type</b>	<i>Original article, qualitative research, randomized control and trial</i> , dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian	Artikel <i>review</i> , buku, <i>quantitative research and mix method</i> , dan artikel yang tidak berkaitan dengan judul penelitian
<b>Publication years</b>	Post. 2012-2021	Pre. 2012-2021
<b>Language</b>	Indonesia dan Inggris	Bahasa lainnya selain bahasa Indonesia dan Inggris

Adapun *keywords* yang digunakan dalam pencarian artikel yaitu Stakeholder AND Wisata Bahari AND Pengembangan OR Pemanfaatan OR Pembangunan AND Peran AND

Semua artikel yang berkaitan dengan Peran Stakeholder dalam Pengembangan Wisata Bahari. *Keywords* ini digunakan untuk mencari artikel, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan pembahasan peneliti dan kemudian di seleksi menggunakan PRSIMA *Flowchart*.

### ***Seleksi Artikel***

Berdasarkan hasil pencarian melalui Google Scholar. Dengan menggunakan *keywords* yang sudah disesuaikan dengan PICO(S). Mendapatkan 1.140 artikel, kemudian setelah dilakukan pengecekan artikel terdapat 49 duplikasi, sehingga artikel tersebut dieksklusi, dan tersisa 1.091 artikel. Kemudian peneliti melakukan skinning berdasarkan judul ( $n = 281$ ), selanjutnya peneliti melakukan penyaringan berdasarkan abstrak ( $n = 37$ ), dantext full (25) yang temanya disesuaikan dengan tema scoping *review*. Diagramflowchart, sebagai berikut:

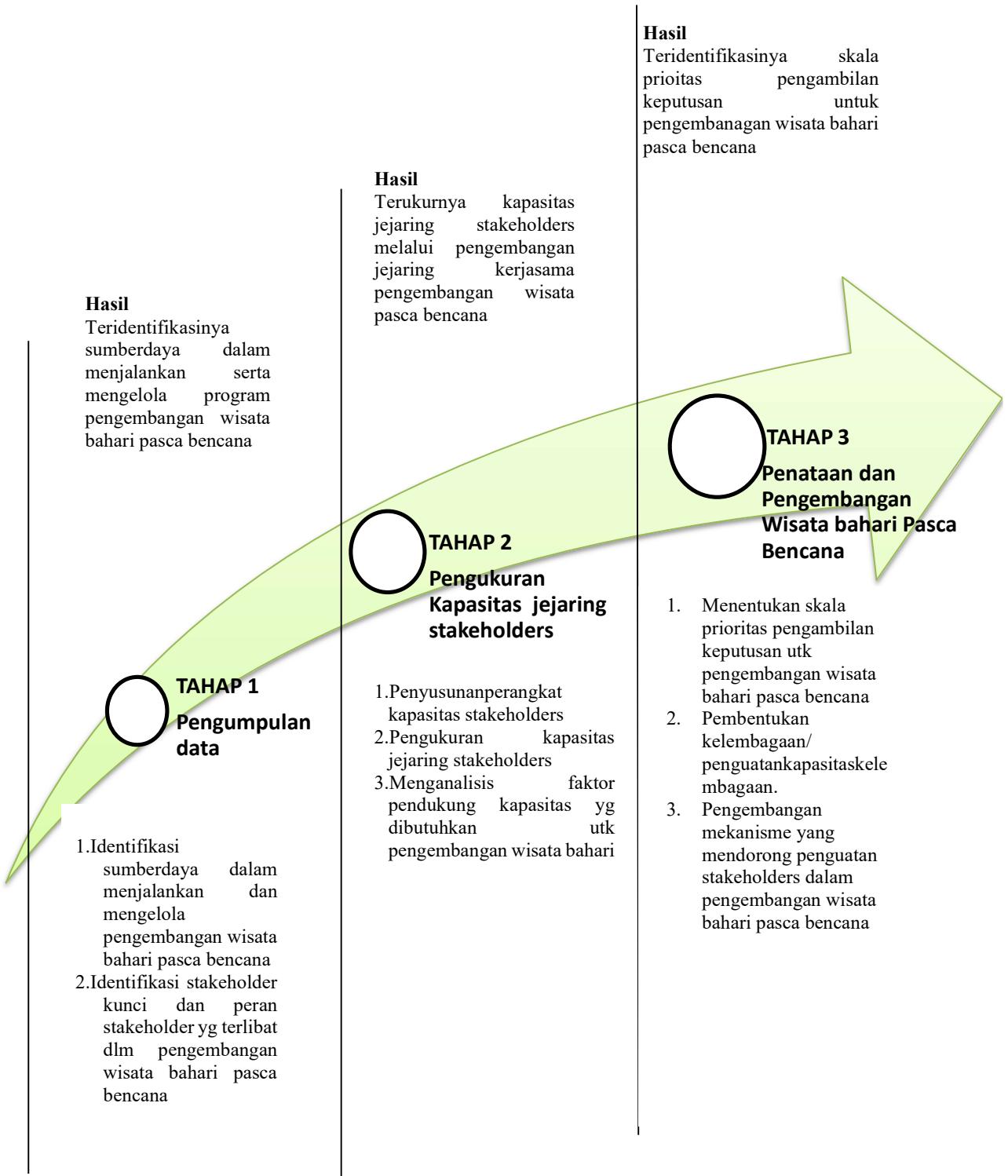


Gambar 2. Diagram flowchart

### 3.3 Bagan Alir Penelitian

Bagan alir penelitiannya sesuai dengan tahap tahapnya dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.

Gambar 3. Bagan alir Penelitian



### 3.4 Luaran dan Target Capaian

Tabel 3. Luaran dan Target Capaian

No	Jenis Luaran	Wajib	Tambahan	Indikator Capaian
1	Laporan Akhir Penelitian	v		Terlaksana
2	Laporan Penggunaan Anggaran	v		Terlaksana
3	Artikel ilmiah pada prosiding international terindeks <i>Scopus</i>	v		Terpublikasi
4	Mengikuti seminar	International	v	Terlaksana
		Nasional	v	Terlaksana
5	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)			3

## **BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Gambaran Umum Kabupaten Lampung Selatan**

#### **4.1.1 Kondisi Geografis dan Iklim**

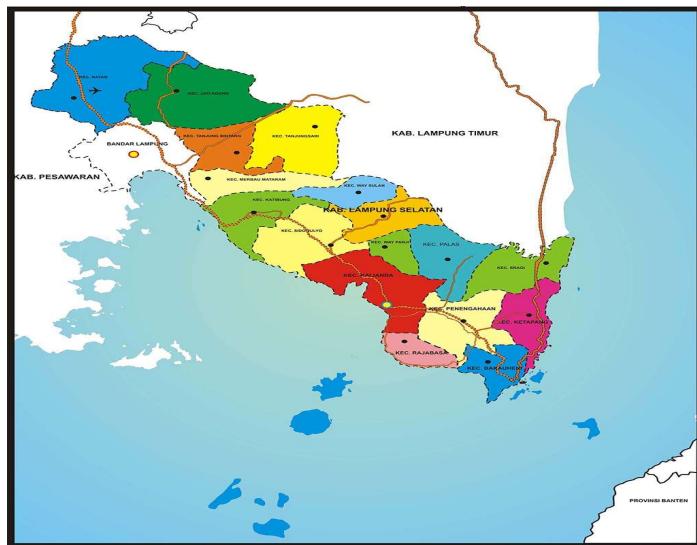
Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang terletak antara  $105^{\circ} 41'$  dan  $105^{\circ} 45'$  Bujur Timur,  $5^{\circ} 15'$  dan  $6^{\circ}$  Lintang Selatan, dengan suhu minimum  $20,80^{\circ}\text{C}$  dan suhu maksimum  $36,80^{\circ}\text{C}$  serta kelembapan udara berkisar antara 66 sampai 85 persen. Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah tropis dengan bagian selatan berbentuk meruncing dan mempunyai sebuah teluk besar yaitu Teluk Lampung. Di Teluk Lampung terletak sebuah pelabuhan yaitu Pelabuhan Panjang yang secara umum merupakan faktor penting bagi kegiatan perekonomian Provinsi Lampung.

Daerah Kabupaten Lampung Selatan memiliki daratan seluas  $2.007,01\text{ Km}^2$  dan lautan seluas  $3.849,21\text{ Km}^2$ . Pusat pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan berada di Kota Kalianda yang diresmikan menjadi Ibukota Kabupaten Lampung Selatan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 11 Februari 1982, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Tanggamus, yaitu pemekaran dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Pada tahun 2006, terjadi pemekaran Kabupaten Pesawaran dari wilayah Kabupaten lampung Selatan. Setelah terjadi pemekaran, jumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan dari 20 (dua puluh) kecamatan berkurang menjadi 13 (tiga belas) kecamatan. Kemudian pada tahun 2008, terjadi pemekaran kembali yaitu kecamatan Tanjung Sari, Way Sulan, Way Panji, dan Kecamatan Bakauheni. Dengan demikian, jumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan berjumlah 17 (tujuh belas) kecamatan. Secara administrasi, Kabupaten Lampung Selatan memiliki batas-batas wilayah, sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur
- 2) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Selat Sunda
- 3) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran
- 4) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Jawa

**Gambar 2. Peta Wilayah Kabupaten Lampung Selatan**



Sumber: *Kabupaten Lampung Selatan, Tahun 20016*

Tabel 4. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan

Kecamatan	2016	
	Luas Wilayah (Km2)	
	Luas	Persentase Terhadap Total
Natar	213.77	10.65
Jati Agung	164.47	8.19
Tanjung Bintang	129.72	6.46
Tanjung Sari	103.32	5.15
Katibung	175.77	8.76
Merbau Mataram	113.94	5.68
Way Sulan	46.54	2.32
Sidomulyo	122.53	6.11
Candipuro	84.69	4.22
Way Panji	38.45	1.92

Kalianda	161.40	8.04
Rajabasa	100.39	5
Palas	171.39	8.54
Sragi	81.92	4.08
Penengahan	132.98	6.63
Ketapang	108.60	5.41
Bakauheni	57.13	2.85
Lampung Selatan	2007.01	100

Sumber: *Kabupaten Lampung Selatan, Tahun 2016*

Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan yaitu Pulau Krakatau, Pulau Sebesi, Pulau Segitiga, Pulau Sebuku, Pulau Legundi, Pulau Siuncal, Pulau Rimau dan Pulau Kandang. Secara geografis, Kabupaten Lampung Selatan merupakan wilayah yang strategis sebagai pintu gerbang arus perekonomian dan perjalanan antara dua pulau ekonomi utama di Indonesia yaitu Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Kabupaten Lampung selatan juga memiliki kelengkapan sumber daya kepariwisataan berbasis yang mendekati seluruh sumber daya kepariwisataan yang ada di Sumatera seperti bahari, gunung, perkotaan, dan lain-lain serta memiliki keragaman etnis budaya yang diakibatkan oleh migrasi penduduk yang masih menjaga budaya aslinya secara kuat.

Tabel 5.      Tabel 3 Statistik Geografi Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016

Uraian	Satuan	2016
Luas	km <sup>2</sup>	2.007,01
Pulau	Buah	31
Kecepatan Angin	Knot	2,5 – 5,7
Kelembapan	%	66 – 85
Hari Hujan	Hari	1 – 23
Desa di Lereng/Puncak	Desa	20
Desa di Lembah	Desa	2
Desa di Dataran	Desa	238

Sumber: *Lampung Selatan, 2017*

#### 4.1.2 Kondisi Demografis (Kependudukan)

Kabupaten Lampung Selatan memiliki luas mencapai 2.007,01 Km<sup>2</sup> memiliki jumlah penduduk sebanyak 961.897 jiwa sehingga kepadatan penduduk per 1 Km<sup>2</sup> mencapai

479 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 maka terjadi penambahan penduduk sebanyak 5 jiwa per 1 Km<sup>2</sup> atau meningkat 1,05 persen.

Sementara itu, untuk tingkat kecamatan, Kalianda memiliki jumlah penduduk 73.412 orang yang ada dalam 16.957 KK. Sedangkan Kecamatan Rajabasa kepadatan penduduknya hanya 215 jiwa per 1 km<sup>2</sup>.

Tabel 6. Indikator Kependudukan Kabupaten Lampung Selatan

Indikator Kependudukan	2013	2014	2015
Jumlah Penduduk (jiwa)	950.844	961.897	972.579
Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	474	479	485
Sex Ratio (%)	105,72	105,61	105,53
Jumlah Rumah Tangga	245.927	253.131	256.255
Rata-rata Anggota Rumah Tangga (jiwa/ruta)	3,87	3,80	3,80

Sumber: *Lampung Selatan, 2016*

#### 4.1.3 Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan pada dasarnya masyarakat yang heterogen secara etnis. Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari suku Lampung, Jawa, Sunda, Bali, Semendo atau Ogan, dan sebagainya. Secara umum, masyarakat yang cukup dominan di Kabupaten Lampung Selatan adalah kelompok masyarakat adat Lampung, Jawa, Bali dan Semendo/Ogan. Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan memiliki berbagai ragam latar belakang budaya, kesukuan, pendidikan, dan agama.

Penduduk daerah ini dapat dikelompokkan dalam masyarakat adat Lampung dan kelompok pendatang. Keberadaan kelompok ini telah membentuk suatu pertalian adat dan budaya yang menjadi suatu akulturasi budaya. Adat masyarakat di Lampung Selatan terdiri dari kelompok adat pemimpin dan pepadun. Cirinya adalah genelogis dan sistem kekerabatan patrilineal.

Penduduk Kabupaten Lampung Selatan dalam bentuknya yang asli memiliki struktur hukum adat tersendiri. Hukum adat tersebut berbeda antara satu dengan yang lain. Kelompok-kelompok tersebut menyebar di berbagai tempat, yang secara umum dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu masyarakat Lampung Pemimpin yang

merupakan suku Lampung di Kabupaten Lampung Selatan dan masyarakat Lampung adat Pepadun. Masyarakat Lampung Peminggir tidak mengenal istilah Pepadun tetapi dengan istilah Saibatin. Saibatin ini secara turun temurun dikenal sebagai orang yang mempunyai pengaruh pada suatu kelompok atau lingkungan besar.

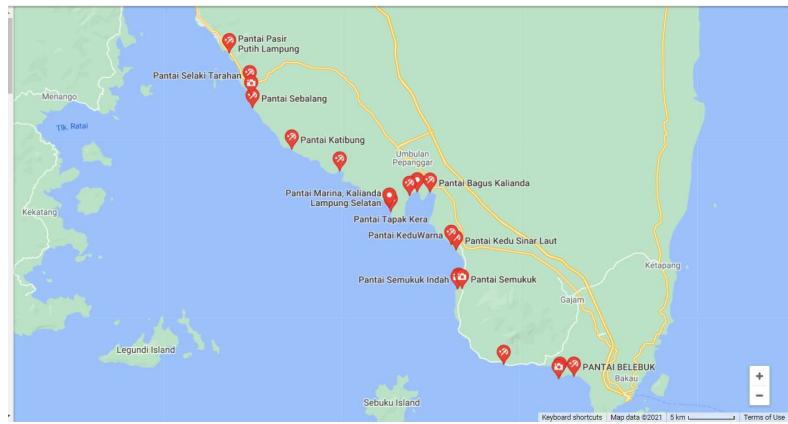
#### **4.1.4 Kondisi Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi rata-rata di Kabupaten Lampung Selatan periode tahun 2010-2014 rata-rata sebesar 6 persen dan per tahun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami peningkatan dari 771,9 M pada tahun 2010 menjadi 1,5 T pada tahun 2014. Walaupun sektor pertanian mengalami penurunan nilai tertinggi yang diakibatkan pemekaran Kabupaten Pesawaran, akan tetapi dampaknya tidak terlalu mempengaruhi karena sektor ini merupakan sektor unggulan di Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini dapat dilihat tahun 2010-2014, sektor pertanian kembali mengalami kenaikan sebesar 626.126.000.000 atau 19,6 persen, begitu juga dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Lampung Selatan mengalami kenaikan sebesar 1.153.891.000.000 atau naik sekitar 15,9 persen. Indeks pembangunan manusia juga mengalami kenaikan selama periode 200-2014 yaitu dari 70,06 persen menjadi 72 persen.

Perekonomian Lampung Selatan bertumpu pada sektor pertanian dengan kontribusi 47,81 persen. Sementara itu, berdasarkan data PDRB Lampung Selatan, sektor pertambangan mencapai 1,20 persen, industri pengolahan 8,62 persen, listrik dan air bersih 0,38 persen, dan bangunan 4,43 persen. Sektor lain yang menjadi andalan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan adalah sektor perdagangan, restoran, dan hotel 11,71 persen, angkutan dan komunikasi 10,38 persen, keuangan dan penyewaan jasa perusahaan 6,13 persen, serta jasa-jasa 4,43 persen.

#### **4.2 Potensi Wisata Pantai di Lampung Selatan**

Potensi wisata bahari di Lampung Selatan sangat besar. Disepanjang pesisir barat kabupaten ini terdapat pantai-pantai, baik yang sudah dikelola dengan manajemen modern maupun manajemen tradisional.



Gambar 4. Peta Titik Wisata Pantai di Lampung Selatan

#### *Pantai Tanjung Helau*



Gambar 5. Pantai Tanjung Helau

Sumber : <https://www.pariwisatalamsel.com/>

Pantai ini juga punya ciri khasnya tersendiri. Hamparan pasirnya yang berwarna putih dan halus, diujung pasirnya ada jajaran batu karang yang indah dan juga berfungsi untuk memagari bibir pantai.

Keindahan lain yang ditawarkan oleh Pantai Alau Alau Kalianda ini selain pasirnya yang berwarna putih dan air lautnya yang berwarna biru adalah pemandangan gunung yang terlihat dari kejauhan. Dari bibir pantai, kalian bisa melihat megahnya Gunung Krakatau.

### **Pantai Kedu**



Gambar 6. Pantai Kedu  
Sumber : <https://www.pariwisatalamsel.com/>

Pantai Kedu terkenal akan indahnya pemandangan sunset atau matahari terbenam di pantai ini dengan ditemani ombak pantai yang menggulung indah dan hamparan pasir putih yang bersih. Pesona pemandangan sunset di pantai ini didukung dengan posisi pantai yang menghadap ke arah Barat sehingga pemandangan sunset di pantai ini terasa lebih spesial, belum lagi pemandangan Gunung Rajabasa dan Krakatau yang eksotis seolah-olah berdiri diatas permukaan laut.

Selain itu juga tersedia berbagai fasilitas untuk para wisatawan seperti ATV, Hammock dan lain-lain. Dan bagi anda yang ingin melepas dahaga atau mengisi perut yang kercongan, di sepanjang pantai ini terdapat berbagai menu kuliner yang lezat dan enak untuk disantap seperti menu aneka ragam seafood dan minuman.

Di Pantai Kedu, terdapat kapal terdampar di bibir pantai, menurut cerita masyarakat konon kabarnya kapal ini adalah salah satu kapal yang di “Bom” oleh Bu Susi Menteri Kelautan dan Perikanan. Setiap hari minggu, disini terdapat Wisata Delman, yang akan melayani Anda yang berkunjung ke Pantai Kedu.

### ***Kahai Beach***



Gambar 7. *Kahai Beach*  
Sumber : <https://www.pariwisatalamsel.com/>

Krakatau Kahai Beach merupakan pantai yang berbeda dengan pantai-pantai pada umumnya di Lampung. Jika umumnya pantai di Lampung hanya menyediakan wahana pemanian di laut, namun di pantai ini wahana-wahana berada di daratan.

Hal ini membuat pengunjung akan merasakan sensasi liburan yang sangat istimewa. Pengunjung juga dapat menikmati penginapan mewah di tepi pantai yang memiliki pemandangan yang luar biasa.



Gambar 8. Pantai Banding  
Sumber : <https://www.pariwisatalamsel.com/>

Pasir yang ada di pantai ini sangatlah putih dan bersih, dan juga dasar pantainya memang pasir, pada lokasi utamanya. Dengan ombak yang lumayan cukup besar, sangat cocok buat kamu yang gemar bermain ombak, karena memang terbilang sangat seru jika kamu bermain ombak di pantai ini.

### ***Pantai Bagus***



Gambar 9. Pantai Bagus  
Sumber : <https://www.pariwisatalamsel.com/>

Pantai Bagus Kalianda atau Pantai Bagoes merupakan satu dari deretan pantai di sekitaran Lampung Selatan. Meski belum setenar pantai-pantai lainnya, namun panorama yang disajikan tidak bisa disepelekan dan bisa dibilang istimewa.

Pantai ini terletak di Desa Merak Belatung, Kecamatan Kalinda. Lokasinya tak jauh dari Pantai Embe dan Juga Grand Elty Krakatoa. Lokasinya juga terletak di pinggir jalan Lintas Trans Sumatera, sehingga aksesnya pun mudah.

### ***Pantai Batu Lapis***

Pantai Batu Lapis adalah salah satu pantai yang ada Lampung Selatan, pantai batu lapis memiliki karakter yang unik karena pantai ini tersusun oleh batu yang berlapis-lapis bukan seperti pantai biasanya yang berupa hamparan pasir.

Pantai dengan laut biru yang jernih serta objek batuan nan cantik bisa anda nikmati di Pantai Batu Lapis Kalianda Lampung Selatan. Batuan di tepi pantai yang memiliki bentuk berlapis-lapis, inilah yang menjadi daya tarik utama yang jarang dijumpai di lokasi lain.



Gambar 10. Pantai Batu Lapis  
Sumber : <https://www.pariwisatalamsel.com/>

### ***Pantai Canti***



Gambar 11. Canti  
Sumber : <https://www.pariwisatalamsel.com/>

Umumnya pantai-pantai memiliki udara yang panas, namun hawa sejuk justru akan anda dapatkan ketika berkunjung ke Pantai Canti Lampung Selatan. Kesejukan berasal dari

rindangnya pepohonan di tepi pantai serta goa alam dan batu karang yang fotogenik melengkapi keindahan pantai ini.

Pantai Canti juga memiliki banyak sekali hal-hal menarik yang bisa dinikamti. Ada goa alam, batu karang yang fotogenik, ombak tenang dan juga pasir pantai yang luas. Pemandangan laut biru dan adanya pulau kecil di depan pantai serta perbukitan disekitarnya adalah perpaduan khas yang tidak boleh anda lewatkan.

### ***Pantai Guci Batu Kapal***

Pantai Guci Batu Kapal yang terletak di Kalianda, Lampung Selatan memiliki bibir pantai yang cantik ditambah keindahan matahari terbenam yang tak terlupakan. Namun di balik keindahan yang ditawarkan pantai ini, ada cerita legenda dibalik nama Pantai Guci Batu Kapal.

Sebuah cerita legenda kuno menjadi latar belakang nama dari tempat ini. Di pantai ini terdapat batu-batu karang yang berbentuk menyerupai kapal. Batu-batu karang itu dapat kita lihat di sisi kanan pantai. Konon tempat ini adalah sebuah pelabuhan. Legendanya, pelabuhan yang menjadi tempat bersandar kapal-kapal bangsa asing ini dikutuk oleh si Pahit Lidah menjadi batu. Si Pahit Lidah tidak menyukai orang-orang di pelabuhan. Orang-orang di pelabuhan terlalu sibuk dan mengacuhkan si Pahit Lidah saat mencoba menyapa mereka. Karena kemarahan tersebut, legenda mengatakan, mereka dikutuk si Pahit Lidah menjadi Batu.



Gambar 12. Pantai Guci Batu Kapal  
Sumber : <https://www.pariwisatalamsel.com/>

### **Pantai Legon Bawang**



Gambar 13. Pantai Legon Bawang  
Sumber : <https://www.pariwisatalamsel.com/>

Pantai Legon Bawang yang terletak di Bakauheni merupakan salah satu pantai tempat wisata yang bagus ada di Kabupaten Lampung Selatan, walaupun belum seterkenal pantai yang lainnya, pantai ini memiliki keistimewaan sendiri yang dapat dinikmati oleh pengunjung yang datang.

### **Pantai Merak Kunjir**



Gambar 14. Pantai Merak Kunjir  
Sumber : <https://www.pariwisatalamsel.com/>

Pantai wisata Merak Kunjir merupakan spot wisata favorit di pesisir kecamatan Rajabasa. Pemandangan laut selat sunda dan Gunung Anak krakatau, menjadi daya tarik

sendiri bagi pengunjung, selain pemandangan selat sunda, Pantai Merak Kunjir juga memiliki potensi air panas belerang di sejumlah titik.

### ***Pantai Merpati***

Kawasan Pariwisata Pesisir Pantai Waymuli memiliki potensi yang cukup khas dengan beragam keindahan alamnya . Terdapat fasilitas yang cukup memadai seperti:Restoran,penginapan,rest area,pemandian,sumber mata air panas dan akses yg sangat mudah dijangkau. Tiket dan harga fasilitas pun sangat murah tetapi sangat berkualitas,cocok untuk liburan keluarga da para pasangan muda. Tempat / Lokasi pariwisata tersebut antara lain : Pantai WARTAWAN, Pantai PUTRI, Pantai MERPATI.

Di sini juga terdapat sebuah restoran yang sudah cukup terkenal yaitu PONDOK SINGGAH BU JUJU. Di Restoran ini menyediakan makanan dan minuman khas pantai seperti: seafood dan berbagai minuman/softdrink. diresto ini kita akan mendapatkan fasilitas pelayanan yg sangat ramah dan dengan harga yg sangat terjangkau.



Gambar 15. Merpati  
Sumber : <https://www.pariwisatalamsel.com/>

### ***Pantai Minang Rua***

Pantai Minang Rua berada di Desa Klawi, Bakauheni, Lampung Selatan, saat ini menjadi salah satu primadona baru tempat wisata banyak dikunjungi masyarakat. Selain menghadirkan keindahan pasir putih nan landai yang terhampar, pantai ini memiliki banyak pesona alam lainnya tak banyak ditemui di tempat lain.



Gambar 16. Minang Rua  
Sumber : <https://www.pariwisatalamsel.com/>

Fasilitas keamanan, kebersihan, serta ketersediaan berbagai fasilitas penunjangnya bisa dikatakan sudah lumayan memadai. Misalnya tempat bilas, toilet, musala, hingga kantin.

Bahkan di beberapa sudut, terdapat beberapa spot foto bisa dijadikan pilihan masyarakat yang ingin berswafoto. Spot-spot foto ini dibuat sangat instagramable, sehingga sangat asyik untuk diunggah di media sosial.

### ***Pantai Pulau Sebesi***

Pulau Sebesi menjadi salah satu pulau yang sedang dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata andalan Lampung Selatan selain Pulau Krakatau.

Pulau Sebesi masuk wilayah Desa Tejang Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan yang terletak di selatan perairan Lampung, lebih tepatnya di sebelah Timur Laut Gugusan Pulau Krakatau, sebelah selatan Pulau Sebuku, dan sebelah timur Pulau Serdang dan Legundi.

Pulau Sebesi memiliki bukit yang biasa disebut Gunung Sebesi yang memiliki tinggi 844 mdpl dan pantai yang asri dengan pemandangan cantik pulau-pulau di sekelilingnya.



Gambar 17. Pulau Sebesi  
Sumber : <https://www.pariwisatalamsel.com/>

### *Pantai Tanjung Tuha*



Gambar 18. Pulau Tanjung Tuha  
Sumber : <https://www.pariwisatalamsel.com/>

Di pantai ini lautan biru menjadi pemandangan eksotis yang sangat menggoda. Disekitar pantai juga ada bukit-bukit dan lahan hijau yang ditumbuhi tanamam jagung milik masyarakat.

Pengunjung bisa menikmati hembusan angin dipinggir pantai sembari berfoto di batuan fotogenik yang berjejeran di pinggir pantai. Batuan yang ada di tepin pantai sangat fotogenik, oleh sebab itu menjadi incaran kaula muda yang hobi berswafoto atau selfie.

Pantai ini masih alami, belum ada fasilitas yang dibangun seperti pondokan dan wahana-wahana pantai. Namun inilah yang menjadi nilai lebihnya karena kondisinya masih sangat alami.

### ***Pantai Teluk Nipah***

Teluk Nipah memiliki potensi wisata yang indah akan namun sayangnya belum banyak tereksplorasi. Destinasi yang terletak di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan ini mempunyai banyak sekali potensi wisata yang masih sangat alami dan menawan. Teluk Nipah memiliki tiga pantai utama, yaitu Pantai Sudul sepanjang 400 meter, Pantai Teluk Nipah 650 meter, dan Pantai Marina 750 meter. Pantai yang berada di Teluk Nipah merupakan objek wisata yang masih asri, dengan deburan ombak yang tenang, tebing-tebing tinggi yang menawan serta pepohonan nipah yang rindang menambah indah suasana di destinasi ini.



Gambar 19. Pantai Teluk Nipah  
Sumber : <https://www.pariwisatalamsel.com/>

### ***Pantai Wartawan***

Pantai Wartawan sangat terkenal dengan adanya sumber air panas yang multifungsi. Selain anda menikmati pemandangan alam yang sangat menarik, Anda juga dapat menikmati sensasi memasak menggunakan air panas di tepi pantai. Anda dapat menikmatinya saat surut.



Gambar 20. Pantai Wartawan  
Sumber : <https://www.pariwisatalamsel.com/>

#### ***Pantai Pasir Putih***



Gambar 21. Pantai Pasir Putih  
Sumber : <https://www.pariwisatalamsel.com/>

#### ***Pantai Pulang Umang-umang***

Pulau Umang-Umang merupakan destinasi wisata ketiga yang kami kunjungi di hari kedua. Pulau kecil ini berada tepat di seberang Pulau Sebesi. Dari pulau ini kita juga bisa melihat Gunung Krakatau yang tampak gagah sedang mengawasi kita dari kejauhan.



Gambar 22. Pantai Pulau Umang-umang  
Sumber : <https://www.pariwisatalamsel.com/>

### ***Pantai Sapenan***

Pantai Sapenan memiliki hamparan pasir putih yang cukup bersih, disana kita bisa berjalan dipantainya dan merasakan jilatan ombaknya yang pecah di pasir pantai. Pantai dengan pasir putih serta pepohonan yang rindang cocok untuk wisata bersama keluarga Anda.



Gambar 23. Pantai Sapenan  
Sumber : <https://www.pariwisatalamsel.com/>

### ***Pantai Tanjung Selaki***

Pantai Tanjung Selaki Tarahan terletak sekitar 30 kilometer dari kota Bandar Lampung. Tepatnya berada di Jalan Soekarno Hatta KM 18, Katibung, Lampung Selatan.

Pantai ini cukup terlihat cantik dengan pasirnya yang bersih dan air lautnya yang cukup jernih. Pantai yang dihiasi oleh batu karang sedang ini banyak dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk memancing ikan dan cumi-cumi yang bermain di sela-sela batu karang. Kendaraan roda dua maupun roda empat dapat masuk hingga ke tepi pantai ini.



Gambar 24. Pantai Tanjung Selaki  
Sumber : <https://www.pariwisatalamsel.com/>

### ***Pantai Kedu Warna***

Pagi dan Sore adalah waktu terbaik untuk berkunjung ke Pantai Kedu Warna. karena Sunrise dan Sunset yang indah akan menjadi temanmu bersantai.



Gambar 25. Kedu Warna  
Sumber : <https://www.pariwisatalamsel.com/>

## **4.3 Stakeholders yang Terlibat dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan**

### **4.3.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan**

Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan, sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Jabatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan, adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris, membawahi :
  - a. Subbag Umum dan Kepegawaian
  - b. Subbag Perencanaan
  - c. Subbag Keuangan
- 3) Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata, membawahi :
  - a. Seksi Lingkungan Wisata
  - b. Seksi Pengembangan Wisata
  - c. Seksi Obyek Daerah Tempat Wisata
- 4) Kepala Bidang Pemasaran, membawahi:
  - a. Seksi Promosi
  - b. Seksi Informasi
- 5) Kepala Bidang Kebudayaan, membawahi:
  - a. Seksi Kesenian
  - b. Seksi Cagar Budaya
  - c. Seksi Sejarah
- 6) Kepala Unit Pelaksana Teknis
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

### ***Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan***

- 1) Kepala Dinas

Tugas pokok Kepala Dinas adalah memimpin Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, melaksanakan pembinaan terhadap aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar pelaksanaan tugas dapat berdaya guna dan berhasil dalam melaksanakan kerjasama dan koordinasikan dibidang pelaksanaan dan pengendalian pariwisata dan kebudayaan dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku untuk kelancaran tugas dibidang pariwisata dan kebudayaan.

2) Kepala Seksi Kesenian

Tugas pokok Kepala Seksi Kesenian adalah melaksanakan sebagian tugas Sub Dinas Seni dan Budaya dibidang pengumpulan dan penyiapan bahan dan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan teknis, pembinaan, pendataan, pengawasan, pemantauan, pengembangan, pelestarian, peningkatan, dan kualifikasi nilai dan kegiatan lain yang memiliki unsure, nilai norma, menyiapkan kelengkapan administrasi, penetapan pajak atau retribusi, perizinan yang meliputi mandala wisata, impresariat, sanggar seni, pertunjukan temporer, teater, seni, musik musik dan kegiatan lain yang memiliki unsur, nilai dan norma seni.

3) Kepala Seksi Sejarah

Tugas pokok Kepala Seksi Sejarah adalah melaksanakan tugas Dinas Seni dan Budaya dibidang pengumpulan dan penyiapan bahan dan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan teknis, pembinaan, mengawasi, mengali, pencarian, pendataan, penelitian, pemanfaatan, pemindahan, pelestarian, perawatan, pengadaan, pengamanan, penyimpanan, dan pemilikan benda Cagar Budaya, Benda Sejarah, Benda Kepurbakalan, dan kesejarahan, penyiapan ketetapan pajak dan retribusi serta penyiapan kelengkapan administrasi perizinan kesejarahan dan kepurbakalaan.

#### **4.2.2 Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)**

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan kelembagaan ditingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sampa pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan memanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Kelompok ini bersifat informal sebagai wadah bertukar pikiran, kegiatan, pembicaraan dan pengembangan dalam rangka mencapai tujuan agar

wilayah di Kabupaten Lampung Selatan dapat menjadi wilayah yang mempunyai daya tarik wisata serta menjadi desa wisata.

Pokdarwis merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan, meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan, meningkatkan nilai manfaat kepariwisataan bagi masyarakat atau anggota Pokdarws serta mensukseskan pembangunan kepariwisataan.

### ***Maksud dan Tujuan Pembentukan Pokdarwis***

#### a. Maksud Pembentukan Pokdarwis

Mengembangkan kelompok masyarakat yang dapat berperan sebagai motivator, penggerak serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat di sekitar destinasi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi berkembangnya kepariwisataan, serta memiliki kesadaran akan peluang dan nilai manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

#### b. Tujuan Pembentukan Pokdarwis

Tujuan dari pembentukan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah.
- 2) Membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaat bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat.
- 3) Memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah.

### ***Fungsi dan Kedudukan Pokdarwis***

#### a. Fungsi

Secara umum, fungsi Pokdarwis dalam kegiatan kepariwisataan adalah :

- 1) Sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata.

- 2) Sebagai Mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Kabupaten atau Kota) dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di daerah.

b. Kedudukan

Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) berkedudukan di Desa atau Kelurahan di sekitar destinasi pariwisata.

c. Keanggotan

Syarat-syarat umum keanggotaan Pokdarwis adalah sebagai berikut :

- 1) Bersifat sukarela.
- 2) Memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan kepariwisataan.
- 3) Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi daya tarik wisata dan memiliki kepedulian terhadap pariwisata.
- 4) Mempunyai mata pencaharian atau pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa bagi kebutuhan wisatawan, baik langsung maupun tak langsung.
- 5) Jumlah anggota setiap Pokdarwis minimal 15 orang.

***Kepengurusan***

Kepengurusan Pokdarwis terdiri dari Pembina, penasehat, pimpinan, sekretariat, anggota, dan seksi-seksi antara lain : keamanan dan ketertiban, kebersihan dan keindahan, daya tarik wisata dan kenangan, hubungan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha.

Besarnya struktur organisasi Pokdarwis ditentukan oleh jumlah anggota. Pokdarwis dengan jumlah anggota yang cukup besar dapat dilengkapi dengan beberapa seksi yang menangani bidang-bidang kegiatan.

***Daftar Pokdarwis dan Forum Pokdarwis di Kabupaten Lampung Selatan***

Pokdarwis di Kabupaten Lampung Selatan mulai dibentuk pada Tahun 2013 yang terdiri dari 4 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Penengahan, Kecamatan Rajabasa dan Kecamatan Kalianda.

Tabel 7. Daftar Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Forum Komunikasi  
Kelompok Sadar Wisata (Forkom Pokdarwis) di Kabupaten Lampung Selatan

NO	LOKASI POKDARWIS		NAMA POKDARWIS	NAMA PENGURUS
	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN		
1	2	3	4	5
1	Rajabasa	Way Muli	Karang Upas	Ketua : Samhudi Sekretaris : Samsudin. Sy Bendahara : Faturohman
2		Banding	Of Deling Ketimbang	Ketua : Riza Pitra Sekretaris : Reza Pahlevi Bendahara : Nensi Listya
3		Canti	Gema Wisata Canti Indah	Ketua : Arief Rizal Sekretaris : Mara Suthan Bendahara : Syahbilal. S
4		Hargo Pancuran	Pancuran Mas Indah	Ketua : Sanusi Sekretaris : Wahidin Bendahara : Suwondo
5		Batu Balak	Kahai Indah	Ketua : Muhammad Syukur Sekretaris : Nurdin Bendahara : Siti Rodiah
6		Betung	Way Kulut	Ketua : Jaya Husin Sekretaris : Moch. Thoha Bendahara : Rosidah
7		Canggung	Setigi Heni	Ketua : Syarifuddin Sekretaris : M. Ali Bendahara : Herlyansyah
8		Kunjir	Bina Remaja	Ketua : Nasrul. MS Sekretaris : Ardiyansyah Bendahara : Halim. AR
9		Tejang Pulau Sebesi	Sebesi Indah	Ketua : Syaifullah Sekretaris : Ahmad Yani Bendahara : Iin Osiyani
10	Kalianda	Merak Belantung	Teluk Belantung	Ketua : Warzaii Sekretaris : Hasanudin Bendahara : Herlina
11		Kesugihan	Bandakh Legun	Ketua : Zaidan. AS Sekretaris : Masnoni Bendahara : Mirza Kifli
12		Way Urang	Laguna Indah	Ketua : Ubai Dulah,SH Sekretaris : Salim

				Bendahara : Udin Syamsudin
13		Kecapi / Babulang	Ngandan Jejama	Ketua : Iskandar. S Sekretaris : Badrul Ulia Bendahara : Yahya Berian
14		Tengkujuh	Way Guyuran	Ketua : Khoidir Sekretaris : Hasyim Adenan Bendahara : N. Zaini, SE
15		Toto Harjo	Ragom Helau	Ketua : Rohmat Hidayat Sekretaris : Solihin Bendahara : Asia Hadi
16		Kelawi	Minang Rua Bahari	Ketua : Elly Sakila Sekretaris : Yutinawati Bendahara : Endang Iriani
17	Bakauheni	Hatta	Sapta Pesona Hatta	Ketua : Dedi Cahyono Sekretaris : Sudiro Bendahara : Stefani Digna Ferlia
18		Bakauheni	Tanjung Tuna	Ketua : Didi Hodidi Sekretaris : Yati Nurhayati Bendahara : Asril Aibanda
19	Penengahan	Way Kalam	Way Terjun	Ketua : M. Ali Amin S.,S.pd Sekretaris : Muslihan Bendahara : Masdira
20	Lampung Selatan		Forum Komunikasi Lampung Selatan (Komunitas Putra Krakatau/KPK)	Ketua : Yudas Ermadi,S.Ip Seketaris : Ahmad Andi Yahya, ST Bendahara : Qusoiri

Sumber : Dokumentasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan, Tahun 2019

### **Fungsi dan Tugas Pengurus**

Fungsi dan Tugas dari masing-masing pengurus Pokdarwis sebagai berikut:

1. Ketua

- a. Memimpin Kelompok Sadar Wisata
- b. Memberikan pengarahan anggota.

- c. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan serta bertanggung jawab mengenai keuangan dan pelaksanaan kegiatan.
  - d. Memimpin pertemuan dan diskusi kelompok.
  - e. Berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang membidangi pariwisata.
2. Seketaris
- a. Menyusun dan melaksanakan kegiatan administrasi.
  - b. Mempersiapkan bahan-bahan pertemuan kelompok.
  - c. Mengadakan hubungan dan kooordinasi dengan instansi atau pihak terkait.
  - d. Menghimpun seluruh laporan dari anggota.
  - e. Mencatat seluruh hasil pertemuan-pertemuan diskusi
  - f. Bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok.
3. Bendahara
- a. Bertanggung jawab atas pendapatan dan pengeluaran uang.
  - b. Mengusahakan dana bantuan dari pihak lain.
  - c. Bertanggung jawab kepada ketua Kelompok.
4. Seksi Keamanan dan Ketertiban
- a. Membantu upaya penciptaan ketertiban dan keamanan di sekitar lokasi daya tarik wisata atau destinasi pariwisata.
  - b. Bekerjasama dengan pihak keamanan.
  - c. Bertanggung jawab kepada ketua kelompok.
5. Seksi Kebersihan dan Keindahan
- a. Menyelenggarakan kegiatan kebersihan dan keindahan.
  - b. Mengadakan dan menyelenggarakan penghijauan.
  - c. Menyusun program kegiatan kebersihan dan keindahan.
  - d. Bertanggung jawab kepada ketua kelompok.
6. Seksi Tarik dan Kenangan.
- a. Menggali, membina dan mengembangkan berbagai potensi sumber daya wisata, serta kekhasan atau keunikan lokal sebagai daya tarik dan unsure kenangan setempat.
  - b. Mempromosikan berbagai daya tarik wisata dan keunikan lokal.
  - c. Bertanggung jawab kepada ketua kelompok.
7. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya
- a. Mengembangkan bentuk-bentuk informasi dan publikasi kepariwisataan dan kegiatan Pokdarwis.

- b. Mengembangkan kemitraan untuk kegiatan pelatihan pariwisata bagi anggota Pokdarwis dan masyarakat, termasuk *hospitality* (keramah tamahan), pelayanan prima, dan sebagainya.
- c. Mengikutsertakan anggota kelompok dalam penataran, ceramah, diskusi yang di selenggarakan oleh lembaga, organisasi pariwisata.
- d. Mengadakan lomba keterampilan pengetahuan kepariwisataan.
- e. Bertanggung jawab kepada ketua kelompok.

8. Seksi Pengembangan Usaha

- a. Menjalin hubungan dan kerjasama atau kemitraan, baik di dalam maupun diluar berkaitan dengan pengembangan usaha kelompok.
- b. Membentuk koperasi untuk kepentingan kelompok dan masyarakat pada umumnya.
- c. Bertanggung jawab kepada ketua kelompok.

9. Anggota

Keberadaan anggota merupakan unsure utama dalam organisasi Pokdarwis, baik secara organisatoris maupun secara operasional di lapangan, untuk itu perlu di koordinasikan dan dikelola dengan baik oleh masing-masing seksi yang ada dalam organisasi Pokdarwis.

***Kegiatan Pokdarwis***

Lingkup kegiatan Pokdarwis yang dimaksud di sini adalah berbagai kegiatan yang dapat di programkan dan dilaksanakan untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pembentukan organisasi Pokdarwis.

Lingkup kegiatan tersebut meliputi antara lain :

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan para anggota Pokdarwis dalam bidang kepariwisataan.
- 2) Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan para anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata dan usaha terkait lainnya.
- 3) Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik dalam mendukung kegiatan kepariwisataan di daerahnya.

- 4) Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik pariwisata setempat melalui upaya-upaya perwujudan Sapta Pesona.
- 5) Mengumpulkan, mengolah dan memberikan pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat setempat.
- 6) Memberikan masukan-masukan kepada aparat Pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan.

#### ***Dasar Hukum Pokdarwis***

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan Sebagai Undang-undang
- 2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.
- 5) Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.
- 6) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata.
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015.

#### **4.3.3 Pihak Swasta yang terkait dengan Pariwista**

Pengelola Destinasi Wisata di lampung Selatan yang dikelola pemerintah daerah hanya Pemandian air Belerang di kalianda dan Obyek wisata Pulau Sebesi. Selain itu semuanya dikelola swasta dan masyarakat. Yang skala besar dan sudah dikenal masyarakat di luar Lampung bahkan manca negara adalah Grand Elty dan Kahay Resort. Untuk pantai

pantai yang lain dikelola oleh masyarakat setempat. Sepanjang Pesisir Kabupaten Lamsel memiliki pesona pantai yang sangat indah. Pantai-pantai tersebut diantaranya adalah seperti yang terdapat dalam tabel 5 berikut ini.

Tabel 8. Daftar lokasi Wisata

Objek Wisata	Kecamatan
Pantai Laguna	Kecamatan Kalianda
Pantai Bagus	Kecamatan Kalinda
Pantai Guci Batu Kapal	Kecamatan Kalianda
Pantai Embe Beach	Kecamatan Kalianda
Pantai Sepenan	Kecamatan Kalianda
Pantai Tanjung Beo	Kecamatan Kalianda
Pantai Banding Resort	Kecamatan Rajabasa
Pantai Canti Indah	Kecamatan Rajabasa
Pantai Kunjir	Kecamatan Rajabasa
Pantai Wartawan	Kecamatan Rajabasa
Pantai Meparti	Kecamatan Rajabasa
Pantai Belebuk	Kecamatan Bakauheni
Pantai Pulau Mengkudu	Kecamatan Bakauheni
Pantai Minang Rua	Kecamatan Bakauheni
Pantai Batu Alif	Kecamatan Bakauheni

Sumber: Dokumentasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lamsel , 2019

Dari gambar 2 tersebut terlihat bahwa pantai-panti di sepanjang pesisir Kalianda mempunyai pemandangan yang sangat indah dan layak untuk dikelola sebagai salah satu destinasi wisata bahari.

#### 4.3.4 Pihak Media Massa

Salah satu media daring yang cukup aktif mempromosikan tujuan-tujuan wisata di Lampung Selatan adalah <https://www.pariwisatalamsel.com/>.



Gambar 26. Portal Promosi Pariwisata Lampung Selatan

Sumber : <https://www.pariwisatalamsel.com/>

Beberapa media daring lainnya juga mempromosikan tujuan wisata di Lampung Selatan namun tidak secara khusus misalnya <https://www.travelingyuk.com/lampung-selatan/16883>; <https://www.andalastourism.com/tempat-wisata-lampung-selatan>; <https://infolpg.com/wisata-di-lampung-selatan/>; <https://wisatalengkap.com/tempat-wisata-di-lampung-terbaru/5/>.

#### 4.4 Peran Stakeholders dalam Pengelolaan Pariwisata di Indonesia

Memetakan artikel yang dipilih merupakan langkah selanjutnya untuk mendeskripsikan poin-poin penting berdasarkan hasil temuan yang diperoleh untuk menjawab tujuan penelitian. Artikel yang di *review* sebanyak 17 artikel terkait peran stakeholder dalam pengembangan wisata bahari di Indonesia. Setelah penelitian yang dianggap termasuk dalam kriteria inklusi dikumpul menjadi satu dan ringkasan dikembangkan untuk setiap artikel dengan beberapa variabel, termasuk penulis, tahun, tema penelitian, peserta, dan lokasi. berikut informasi deskriptif artikel yang telah diulas:

Tabel 9. *Charting Data*

<b>Tema</b>	<b>Sub Tema</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Nama penulis,Tahun</b>
Stakeholder yang berperan dalam pengembangan pariwisata	1.Pemerintah 2.Swasta 3.Masyarakat	Peran Stakeholder Pariwisata dalam Pengembangan Pulau Samalona Sebagai Destinasi Wisata Bahari	Reski Amalyah, Djamhur Hamid,Luchman Hakim (2016)
	1. Stakeholder primer/ utama 2. Stakeholder kunci 3. Stakeholdersekunder/ pendukung	Peran, Kepentingan Stakeholder dan Dukungan Kebijakan Dalam Pengembangan Pariwisata Bahari Berbasis Budaya Bahari di Malaumakarta, Kabupaten Sorong	Umi Muawanah,Nendah Kurniasari, Permana Ari Soejarwo, dan Christina Yuliaty (2020)
		Analisis Peran Stakeholders dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai KarangJahe di Kabupaten Rembang	Fitri Handayani,Hardi Warsono (2019)
		Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat dan Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Taman Wisata Alam Laut Pulau Marsegu Kabupaten Seram Bagian Barat PropinsiMaluku	Henderina Lelloltery, Satyawan Pujiatmoko, Chafid Fandelli,dan M.Baiquni (2018)
		Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir Berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul	Riesti Triyanti dan Indah Susilowati (2019)
	Pemerintah; Swasta; Akademisi; Masyarakat/ Komunitas Masyarakat; Media massa	Kolaborasi Pentahelix dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Merauke	Edoardus E. Maturbongs, Ransta L. Lekatompessy (2020)
		Preferensi Stakeholder dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove Gunung Anyar Surabaya	Hera Windy Wahyono (2017)
		Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau	Riska Destiana, Kismartini, Tri Yuningsih (2020)

	Pemerintah; swasta/pengusaha; masyarakat/lembaga masyarakat; media massa	Model Konseptual Pengembangan Wisata Bahari Secara Berkelanjutan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Makassar	Rosmawaty Anwar (2014)
Peran Pemerintah dalam pengembangan wisata bahari	1. Memberikan Motivasi 2. Memberikan Pelatihan dan Pendidikan Kepada Pengelola Objek Wisata 3. Pengembangan Objek Wisata	Peran Pemerintah dalam Pengembangan Objek Wisata Yendi Beach pada Kampung Yendidori Distrik Yendidori Kabupaten Biar Numfor	Djamil Hasim(2020)
	1. Perencanaan Pariwisata 2. Pembangunan Pariwisata 3. Kebijakan pariwisata/Peraturan Pariwisata	Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Destinasi Wisata Bahari Pulau Gili Noko Kabupaten Gresik (Studi Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemudadan Olahraga Kabupaten Gresik)	Achmad Afandi Sunarti Luchman Hakim(2017)
	1. Perencanaan Program dan Kegiatan Pengembangan Pariwisata 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana 3. Promosi Wisata	Peran Pemerintah Desa Lalos dalam Mengembangkan Obyek Wisata Pantai Batu Bangga	Mohammad Sawir, Hasanuddin HPende (2020)
	1. Perencanaan Program dan Kegiatan Pengembangan Pariwisata 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana 3. Promosi Wisata	Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Wisata Teluk Triton Kabupaten Kaimana Proinsi Papua Barat	Fauziah HanumLadia, Afifuddin, AgusZainal Abidin (2020)
	1. Pengembangan Penyediaan Fasilitas Pariwisata	Pengembangan Potensi Wisata Bahari Berbasis Masyarakat di Pulau Pasaran, Bandar Lampung	Nuning Mahmudah Noor, Deny Sapto Chondro Utomo, Andrya Yunila

	<p>2. Pengembangan Promosi Pariwisata</p> <p>3. Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Masyarakat di Sekitar Obyek Pariwisata</p> <p>4. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pariwisata</p>		Hastuti, Ahmad Habibi dan Mahrus Ali(2021)
		Upaya Pengembangan Wisata Bahari di Pulau Maratua oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau	Ricky Septiwirawan, M.Z. Arifin, Dini Zulfiani (2020)
	<p>1.Motivator</p> <p>2.Fasilitator</p> <p>3.Dinamisator/ Stimulator</p>	Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Objek Wisata di Pulau Bokori Kabupaten Konawe	Nurjannah(2019)
		Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Alam (Studi Kasus di Pantai Oetune, Kabupaten Timor Tengah Selatan)	Yudha Eka Nugraha, Elisabet RambuLika Enga (2021)

## **Karakteristik Geografi**

Hasil review artikel yang diperoleh dari Negara Indonesia yaitu Indonesia bagian barat mendapatkan 6 artikel yaitu provinsi Kepulauan Riau, Lampung, serta provinsi Jawa Tengah, DIY Yogyakarta dan Jawa Timur. Inodonesia Bagian Tengah mendapatkan 5 artikel yang meliputi provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, untuk wilayah Indonesia Bagian Timur mendapatkan 6 artikel termasuk provinsi Maluku, NTT, Papua, dan Papua Barat. Ketujuh belas artikel yang diperoleh menggunakan studi penelitian kualitatif semua.

Tabel 10. Tabel 4. Karakteristik Geografi Penelitian

No	Tempat Penelitian	F	%
<b>A Indonesia Bagian Barat</b>			
1	Kepulauan Riau – Tanjung Pinang	1	5,8
2	Lampung – Kota Bandar Lampung	1	5,8
3	Jawa Tengah – Kabupaten Rembang	1	5,8
4	DIY Yogyakarta – Kabupaten Gunung Kidul	1	5,8
5	Jawa Timur – Kabupaten Gresik	1	5,8
6	Jawa Timur – Kota Surabaya	1	5,8
<b>B Indonesia Bagian Tengah</b>			
1	Kalimantan Timur – Kabupaten Berau	1	5,8
2	Sulawesi Selatan – Kota Makassar	2	11,7
3	Sulawesi Tenggara – Kabupaten Konawe	1	5,8
4	Sulawesi Tengah – Kabupaten Tolitoli	1	5,8
<b>C Indonesia Bagian Timur</b>			
1	Maluku – Kabupaten Seram Bagian Barat	1	5,8
2	Nusa Tenggara Timur – Kabupaten Timor Tengah Selatan	1	5,8
3	Papua Barat – Kabupaten Sorong	1	5,8
4	Papua Barat – Kabupaten Kaimana	1	5,8
5	Papua – Kabupaten Biak Numfor	1	5,8
6	Papua – Kabupaten Merauke	1	5,8
<b>Jumlah</b>		17	100

## **Meringkas dan Melaporkan Temuan**

Peran stakeholder dalam pengembangan wisata bahari. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti dia telah menjalankan suatu peran (Handayani & Warsono, 2019). Sedangkan stakeholder menurut Hetifah dimaknai sebagai individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan, terlibat, atau dipengaruhi oleh kegiatan atau program pembangunan (Amalyah, dkk. 2016). Peran disini merupakan keikutsertaan stakeholder dalam membangun dan mengembangkan wisata bahari, tentunya *review* ini dapat digunakan

juga sebagai mengumpulkan data tentang peran stakeholder dalam pengembangan wisata bahari.

Berdasarkan hasil *review* pihak yang berkaitan dan berkepentingan dalam pengembangan wisata bahari adalah (a) stakeholder utama/ primer, stakeholder utama merupakan para pihak yang terkena dampak langsung, baik positif maupun negatif oleh suatu program atau proyek serta mempunyai kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut. diantaranya masyarakat dan komunitas masyarakat yang berperan sebagai pelaksana; (b) stakeholder kunci, stakeholder kunci adalah para pihak yang memiliki kewenangan legal dalam hal mengambil keputusan, yaitu pemerintah sebagai regulator, koordinator, implementator dan fasilitator; (c) stakeholder pendukung/ sekunder, stakeholder pendukung merupakan stakeholder yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap kegiatan tetapi memiliki kepedulian, yaitu swasta/pebisnis dan akademisi sebagai fasilitator, akselerator dan konseptor (Handayani & Warsono., 2019; Henderina Lelloltery, et al., 2018 dan Triyanti & Susilowati., 2019). Salah satu faktor utama keberhasilan partisipasi stakeholder dalam kegiatan pengembangan wisata bahari adalah komunikasi dan koordinasi antara stakeholder baik utama, kunci dan pendukung yang harus berjalan optimal serta mempunyai target waktu serta seluruh stakeholder harus memegang prinsip pengelolaan wisata bahari dengan mengutamakan kedaulatan masyarakat lokal, kelestarian sumber daya alam dan budaya yang merupakan tujuan utama dalam kegiatan pariwisata, dengan hal ini pengembangan wisata bahari bisa berjalan dengan baik dan nantinya bisa berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat lokal (Muawanah, et al., 2020)

### ***Peran Stakeholder***

#### **A. Pemerintah**

Pemerintah mempunyai peranan sentral baik secara perencana, penggerak, pengendali, dan pengawas dalam pelaksanaan pembangunan nasional (MuhAsran Z Labaran, Lukman Hakim, 2014). Pengembangan sektor pariwisata merupakan suatu tindakan yang berdampak positif untuk memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri. Adanya otonomi daerah juga mampu memainkan peranan daerah dalam membuka peluang memajukan daerahnya dengan melakukan identifikasi dan mengelola sumber-sumber

yang berpotensi untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, karena besar kecilnya pendapat daerah sangat berefek kepada keberhasilan pelaksanaan otonomi tersebut (Hasim, 2020).

Pemerintah daerah diharapkan terlibat dalam pengembangan pariwisata bahari yang memiliki peran dalam urusan pariwisata, kebudayaan dan kesenian; perencanaan pengembangan pariwisata yang harus disusun dalam Rencana Strategis (Renstra); penyedia akses dan infrastruktur berkaitan dengan kepariwisataan; memfasilitasi bidang industri dan perdagangan; penegakkan peraturan dan penertiban wilayah sekitar objek wisata dan pemerintah juga terlibat dalam implementasi untuk menentukan berbagai peraturan yang spesifik dalam pengembangan wisata bahari, serta menjalankan peran menyediakan anggaran dan melakukan pengawasan untuk keberlanjutan pengembangan wisata bahari *legislasi*, *budgeting*, dan *controlling* (Maturbongs & Lekatompessy, 2020). Pemerintah (dinas atau lembaga teknis) sebagai stakeholder kunci dalam implementasi kebijakan publik mampu melakukan koordinasi dengan stakeholder lain, menyediakan sarana dan prasarana pendukung wisata bahari; melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat sebagai pengelola objek wisata untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat local; dan promosi pariwisata, seperti melakukan kerjasama dengan komunitas tertentu dan membuat event serta memanfaatkan teknologi digital untuk memperkenalkan objek wisata (Septiwirawan, et al 2020).

## B. Swasta/Pebisnis

Melibatkan swasta sebagai pengembang usaha di bidang wisata bahari juga sangat penting dilakukan. Mengingat penyediaan fasilitas dan pelaksanaan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah. Dalam upaya pengembangan wisata bahari pihak swasta diharapkan bisa memberikan kontribusi yang besar dalam berbagai program pembangunan wisata bahari. Pihak pebisnis sebagai pengelola/pengembang usaha wisata bahari akan menjadi motivator dan fasilitator yang sangat berperan. Swasta/Pebisnis harus didorong dan diberikan kesempatan untuk turut berpartisipasi dalam berbagai rencana program pengembangan wisata bahari yang akan dilaksanakan. Peran swasta terutama sebagai investor pada berbagai rencana program yang ditetapkan. Adanya keterlibatan pihak swasta akan menciptakan iklim usaha wisata bahari yang kondusif dan bisa mengembangkan

usaha masyarakat lokal sehingga mampu mengangkat perekonomian masyarakat sekitar kawasan (Anwar 2014).

Keterlibatan dan kerjasama pihak pengusaha jelas akan memberikan andil cukup besar dalam pencapaian target sesuai harapan. Ditambah adanya pengaruh dari media sosial yang memudahkan untuk mempromosikan daerah-daerah wisata yang membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk berbisnis dan secara tidak langsung membuka lapangan pekerja baru bagi masyarakat kawasan wisata, produk bisnis yang dapat dikembangkan berupa jasa yang diberikan kepada konsumen, seperti: objek wisata sebagai produk utama yang ditawarkan (penyedia biro perjalanan dalam mempromosikan wisata dengan membuat paket wisata); transportasi (tour&travel penyedia tiket pesawat, rental kendaraan/penyedia transportasi); pemandu wisata (pemilik usaha dapat mempekerjakan masyarakat sekitar objek wisata untuk menjadi pemandu wisata); akomodasi atau penginapan; usaha kuliner; jasa fotografi dengan spot-spot indah pada objek wisata, serta jasa atau produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan wisatawan.

### C. Akademisi

Kapasitas akademisi adalah membentuk peserta didik untuk berpikir secara kritis, mengembangkan bakat dan menghasilkan pengetahuan serta keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermsyarakat. Selain itu akademisi juga sebagai konseptor yang dapat membantu pengelola wisata melalui penelitian yang telah dilakukan serta untuk membentuk masyarakat melalui penyediaan tenaga kerja terampil, sehingga pengetahuan ekonomi masyarakat dapat berkembang (Halibas et al., 2017). Peran akademisi dalam pengembangan wisata bahari tidak hanya melalui penelitian, namun juga membantu meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan/ skill pengelola wisata dan masyarakat lokal berdasarkan konsep, teori, strategi dan model pengembangan wisata bahari yang relevan dengan kebutuhan dan kondisi potensi wisata bahari serta tentunya untuk meningkatkan peluang usaha bagi masyarakat lokal. Keterlibatan akademisi diharapkan dapat memberikan nilai positif untuk pengembangan wisata bahari dan akademisi juga bisa berkontribusi dalam evaluasi program pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata; dan secara tidak langsung

dapat membantu memberikan pelatihan-pelatihan dan sumbangan pemikiran dalam proses pengelolaan wisata bahari (Destiana, et al., 2020).

#### **D. Komunitas masyarakat**

Komunitas masyarakat didefinisikan sebagai masyarakat lokal yang membentuk sebuah kelompok, ataupun masyarakat hukum adat sebagai pemilik hak ulayat, serta kelompok-kelompok yang dibentuk seperti dewanesenian daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau kelompok- kelompok berdasarkan minat atau hobi, yang bertujuan mengeksplor atau mempromosikan kepariwisataan di daerah (Maturbongs & Lekatompessy, 2020). Komunitas masyarakat memiliki peran penting baik sebagai fasilitator atau pendamping masyarakat, maupun sebagai motivator dan fasilitator terhadap semua masukan dan informasi strategi dan kebijakan pembangunan. Komunitas mayarakat lokal harus berperan aktif dalam setiapkegiatan, mulai pada saat inisiasi dan akselerasi pembangunan wisata bahari.

Komunitas masyarakat yang dibentuk bukan hanya untuk memperkenalkanwisatanya semata, namun juga kelompok-kelompok tersebut mempunyai peran melestarikan budaya dan menjaga ekosistem sumber daya alam yang berkaitan dengan potensi wisata agar pengembangan wistaa bahari tidak hanya mensejahterakan perekonomian masyarakat tetapi bisa mepetahakandan memperkenalkan budaya masyarakat lokal serta memberikan ide, gagasan dan masukan kepada sektor potensial yang berperan sebagai penggerak sektor-sektor lainnya dan komunitas. Komunitas yang dimaksud seperti Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dimana komunitas ini sebagai salah satu unsur penggerak dalam mendukung terciptanya lingkungan dan suasana yang kondusif, serta memiliki kepedulian dalam mengembangkan kepariwisataan di daerahnya; komunitas masyarakat yang memfasilitasi antara kepentingan nelayan, pelaku wisata dan masyarakat lokal secara keseluruhan dengan stakeholder dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan wisata bahari; dewan kesenian daerah, LSM, atau kelompok-kelompok berdasarkan minat atau hobi, yang bertujuan mengeksplor atau mempromosikan kepariwisataan di daerah. Dan juga kelompok atau komunitas seperti blogger, fotografi, dan komunitas lainnya (Triyanti & Susilowati, 2019)

## **E. Masyarakat Lokal**

Masyarakat merupakan salah satu pemangku kepentingan, memiliki peran utama dalam pengembangan pariwisata. Peran masyarakat tersebut, dimulai dari perencanaan hingga pada implementasi pembangunan pariwisata di daerah. Konsep *Community Based Tourism* (CBT) mencoba menjelaskan peranan masyarakat dalam pariwisata, yang ditempatkan sebagai aktor utama melalui pemberdayaan, sehingga prioritas manfaat kepariwisataan diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat setempat (Maturbongs & Lekatompessy, 2020). Masyarakat lokal menjadi prioritas keterlibatan dalam setiap kegiatan pengembangan wisata bahari, mulai dari proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini diharapkan demi pencapaian target yang efisien dan partisipatif. Masyarakat lokal yang diharapkan terdiri dari aparat desa, Badan Perwakilan Kampung (BPK), tokoh masyarakat, nelayan, pedagang, pelaku wisata, dan organisasi kewanitaan (Anwar, 2014). Peran masyarakat sebagai pengelola wisata bahari; membuka usaha pendukung kegiatan wisata seperti penginapan, warung, kantin, persewaan alat snorkeling, tempat istirahat, dan banana boat; dan menjadi *guide* bagi wisatawan yang ingin snorkeling dan diving (Almalyah et al., 2016). Peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan wisata bahari diharapkan mampu membangkitkan rasa kepemilikan dan tanggungjawab terhadap semua hasil-hasil pembangunan wisata bahari.

Media massa juga berperan sebagai perantara dalam penyampaian informasi antar stakeholder untuk berkoordinasi mengenai penyelenggaraan pengembangan wisata bahari. Media massa menjadi mediator yang berperan mendukung publikasi dalam promosi produk dan layanan pariwisata. Kemampuan media massa yang dapat menyebarluaskan informasi yang dimanfaatkan dalam sektor pariwisata. Daerah terus mempromosikan objek wisata yang dapat menarik minat wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Pilihan destinasi wisata bergantung pada informasi yang didapatkan dari mediamassa Pembangunan citra yang baik dan menarik bagi destinasi wisata melalui media massa akan menjadi penggerak bagi ketertarikan calon wisatawan untuk berkunjung. Pengembangan pariwisata dan media massa mengacu pada semua kegiatan seperti pengembangan keterampilan, penyediaan lapangan kerja dan pemasaran produk pariwisata melalui berbagai saluran media massa sehingga wisatawan dapat mengetahui tentang potensi wisata yang dimiliki (Enemuo , 2015).

Stakeholder memiliki peran dan tanggungjawab dalam melaksanakan pengembangan wisata bahari, seperti pemerintah dalam hal ini sebagai regulator dan fasilitator yang paling bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan pariwisata bahari dan memiliki keterlibatan dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan sesama aktor lainnya yaitu akademisi, pihak swasta/ pebisnis, komunitas masyarakat dan masyarakat lokal sebagai sesuatuyang saling melengkapi untuk mencapai keberhasilan dalam pengembangan wisata bahari. Kolaborasi antar stakeholder dalam pengembangan wisata bahari berdasarkan hasil *review* dapat digambarkan dapat digambarkan sepertipada gambar di bawah:



Gambar 27. Kolaborasi Stakeholder dalam Pengembangan Wisata Bahari  
Sumber: Hasil Penelitian, 2021

## **BAB V. SIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil identifikasi stakeholder menunjukkan bahwa masing-masing stakeholder masih menjalankan fungsi dan perannya secara terpisah, baik stakeholder kunci, stakeholder utama/ primer maupun stakeholder pendukung/ sekunder. Untuk itu diperlukan kerjasama dan koordinasi antar stakeholder dengan melakukan pengelolaan yang bersifat kolaboratif (*Collaboratif management*) dengan memadukan semua stakeholders yang terlibat meliputi masyarakat lokal, komunitas masyarakat, pemerintah, swasta/ pebisnis dan akademisi.

Kolaborasi yang dibangun dengan keterkaitan antar stakeholder dalam pengembangan wisata bahari dimulai dari tahapan perencanaan sampai pembangunan pariwisata berkelanjutan. Peran masing-masing stakeholder selalu berupaya melakukan yang terbaik bagi pengembangan pariwisata yang berdampak bagi masyarakat. Keterlibatan masyarakat lokal merupakan upaya untuk memelihara budaya dan SDA yang sudah ada dalam kehidupan dimasyarakat lokal. Mengoptimalkan kolaborasi dalam pengembangan wisata bahari, dapat dilakukan dengan peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder yang terlibat; penguatan kapasitas kelembagaan bagi dinas maupun lembaga teknis yang memiliki peran dalam pengembangan dan promosi wisata bahari.

### **5.2 Saran**

Diperlukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkala terhadap konsep pengembangan wisata bahari yang tentunya pengembangan wisata tersebut selaras dengan kondisi potensi wisata, sehingga masyarakat memiliki kesadaran dan aktif terlibat dalam kegiatan wisata bahari serta masyarakat memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengelola wisata bahari tersebut. Dan dukungan seluruh stakeholder diperlukan untuk meningkatkan kegiatan pengembangan wisata bahari bagi kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. J. Muljadi. 2009. *Kepariwisataan dan Perjalanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ariyanti, Eka; Sulistiowati, Rahayu; Atika, Dewie Brima, 2015, Pembangunan Kepariwisataan Berbasis Masyarakat di Lampung Selatan. Digilib Unila.
- Afandi, A., Sunarti, S., & Hakim, L. (2017). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Bahari Pulau Gili Noko Kabupaten Gresik (Studi Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Gresik). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 49(1), 116-121.
- Amalyah, R., Hamid, D., & Hakim, L. (2016). Peran stakeholder pariwisata dalam pengembangan Pulau Samalona sebagai destinasi wisata bahari. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 37(1), 158-163.
- Anwar, R. (2014). Model Konseptual Pengembangan Wisata Bahari Secara Berkelanjutan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Makassar. *Journal of Tourism Destination and Attraction*, 2(1), 15-26.
- Ascherson , Neal, 2000, *Public Archaeology*, Vol 1(1), p.1-4
- Chaskin, Robert J., et al. 2001. *Building Community Capacity*. New York: Walter de Gruyter Inc.
- Damanik, Janianton, dan F. Weber Helmut. 2006. *Perencanaan Ekowisata: Dari Teori Aplikasi*.Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Destiana, R., Kismartini, K., & Yuningsih, T. (2020). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(2), 132-153.
- Dwyer, L. and Edwards, D. (2000) Nature-Based Tourism onthe Edge of Urban Development. *Journal of Sustainable Tourism* 8(4): 267-287.
- Fatimaningsih, Endry; Sulistiowati, Rahayu, 2016, *Model Pemberdayaan Perempuan di desa Wisata Kabupaten Lamsel*, laporan penelitian, Hibah Dikti, Unila
- Freeman, R.E. (1984) *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman Publishing.
- Hadiwijoyo, Suyo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hadiwijoyo, Suyo Sakti. 2012. *Negara, Demokrasi dan Civil Society*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hasim, D. (2020). Peran Pemerintah dalam Pengembangan Objek Wisata Yendi Beach pada Kampung Yendidori Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor. *Sosioe-Kons*, 12(02), 138-149.

- Handayani, F., & Warsono, H. (2017). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(3), 40-53.
- Hermawan, D. & Hutagalung, S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Tata Kelola Industri Pariwisata (Studi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Lampung Selatan). *Seminar Nasional Fisip Unila Ke-3 "Agenda Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Local Knowledge"*, 08 Agustus 2019, Bukti Randu Hotel And Resort, Bandarlampung.
- Kagungan, D & Yulianti, D. The synergy among stakeholders to develop Pisang Island as marine tourism: The case of underdeveloped area. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 32(1). <http://dx.doi.org/10.20473/mkp.V32I12019.16-23>.
- Ladia, F. H., Afifuddin, A., & Abidin, A. Z. (2020). Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan potensi wisata Teluk Triton kabupaten Kaimana provinsi Papua Barat. *Respon Publik*, 14(1), 72-89.
- Lelloltery, H., Pujiatmoko, S., Fandelli, C., & Baiquni, M. PENGEMBANGAN EKOWISATA BAHARI BERBASIS MASYARAKAT DAN PERAN STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DI TAMAN WISATA ALAM LAUT PULAU MARSEGUKABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PROPINSI MALUKU. *Jurnal Hutan Tropis*, 6(3), 302-314.
- Kusumadewi, Wulan; Sulistiowati, Rahayu; Atika, Dewi Brima, 2017, *Civil Society dalam pengembangan pariwisata di lampung Selatan*, Digilib, Unila
- Masyono, S. A. & Suhada, B. (2015). STRATEGI PENGEMBANGAN SEKTOR KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. *Derivatif*, 9(1).
- Maturbongs, E. E., & Lekatompessy, R. L. (2020). Kolaborasi Pentahelix dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Merauke. *Sumber*, 81, 59. <https://core.ac.uk/download/pdf/327102202.pdf>
- Muawanah, U., Kurniasari, N., Soejarwo, P. A., & Yuliaty, C. (2020). PERAN, KEPENTINGAN STAKEHOLDER DAN DUKUNGAN KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BAHARI BERBASIS BUDAYA BAHARI DI MALAUMKARTA, KABUPATEN SORONG. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 10(2), 157-168.
- Noor, N. M., Utomo, D. S. C., Hastuti, A. Y., Habibi, A., & Ali, M. (2021). PENGEMBANGAN POTENSI WISATA BAHARI BERBASIS MASYARAKAT DI PULAU PASARAN, BANDAR LAMPUNG. *Inovasi Pembangunan-Jurnal Kelitongan*, 9(1), 103-114.
- Nurjannah, N. (2019). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Objek Wisata di Pulau Bokori Kabupaten Konawe. *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*, 4(1).
- Nugraha, Y. E. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Alam di Kabupaten TTS: Studi Kasus Daya Tarik Wisata Pantai Oetune. *Media Wisata*, 19(1).
- Pamungkas, Gilang, 2013, Ekowisata Belum Milik Bersama: Kapasitas Jejaring Stakeholder dalam Pengelolaan Ekowisata (Studi Kasus: Taman Nasional Gunung Gede Pangrango) *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 24 No. 1, April 2013, hlm.49–64.

- Pramanda, D. (2019). *Analisis Kesesuaian dan Daya Dukung Kawasan Ekowisata Bahari Di Wilayah Pesisir Lampung Selatan (Studi Kasus Di Kecamatan Bakauheni, Rajabasa, Kalianda, Dan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan)*. Fakultas Teknik , Universitas Lampung.
- Pendit, Nyoman S., 1994. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Prasetyowati, Rima dan Murtini, Sri, 2018, *Prioritas Utama Pengembangan Objek Wisata Buatan di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri dengan Pendekatan AHP (Analytical Hierarchy Process)*, Unesa
- Ricky S, M.Z. Arifin., Dini Z., (2020) Upaya Pengembangan Wisata Bahari di Pulau Maratua oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. *eJournal Administrasi Publik*, 2020, (3):9290-9302.
- Saaty, T.L 1980. *The Analytic Hierarchy Process*, McGraw-Hill, New York
- Sawir, M. (2020). PERAN PEMERINTAH DESA LALOS DALAM MENGELOLA OBYEK WISATA PANTAI BATU BANGGA. *Tolis Ilmiah:Jurnal Penelitian*, 2(1).
- Scoot, Noel; Baggio, Rudolfo; Cooper, Chris. 2008. *Network Analysis and Tourism:From Theory to Practice*. Clevedon: Channel View Publications.
- Soekadijo, R.G. 1997. *Anatomi Pariwisata*. Jakarta:PT Gramdia Pustaka Utama.
- Sulistiwati, R., Fatimaningsih, I., Yulianti, D., & Atika, D. B. (2016). The Development Strategy of Potential Marine Tourism in Lampung Selatan for facing Global Tourism Competition. *Shield International Conference* : 377-386
- Sulistiwati, R., Meiliyana, Ma'arif, S., Meilinda, S. D. (2020). Stakeholder Partnership in the Management of Marine Tourism in South Lampung Regency, Lampung. *Indonesian Journal of Tourism and Leisure*, 01(2): 82-91
- Suwantoro, Gamal. 2004, *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Triyanti, R., & Susilowati, I. (2019). ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR BERKELANJUTAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 9(1), 23-34.
- Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

## LAMPIRAN

Anggaran biaya yang diajukan adalah sebesar Rp 20.000.000,00/ periode atau 6 bulan waktu penelitian. Adapun ringkasan besarnya anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11. Ringkasan Anggaran Biaya

No	Item	Jumlah
1.	Pengadaan Alat dan Bahan	5.083.500
2.	<i>Travel expenditure</i>	7.700.000
3.	ATK / BHP	3.836.500
4.	Laporan/ Diseminasi/Publikasi	3.380.000
	<b>TOTAL</b>	<b>20.000.000</b>

LAMPIRAN: BUKTI TELAH DI PRESENTASIKAN DI SEMINAR INTERNASIONAL



## LAMPIRAN BUKTI SUBMIT PROSIDING INTERNASIONAL

  INTERNATIONAL CONFERENCE  
**5th SHIELD 2021**  
University of Lampung

**Form Submit Paper dan Bukti Pembayaran SHIELD**

Mohon diselesaikan sampai dengan 29 September 2021, pkl 23.59 WIB

contact.admnegara@gmail.com [Switch account](#) [Resubmit to save](#)

The name and photo associated with your Google account will be recorded when you upload files and submit this form. Your email is not part of your response.

\* Required

**First Author/ Corresponding Author \***  
Ita Prihantika

**Email's First Author/ Corresponding Author \***  
itaprihantika@fkip.unila.ac.id

**Phone First Author/ Corresponding Author (WA)\***  
08561275145

**Institution \***  
Universitas Lampung

**Title of Manuscript \***  
The role of stakeholders in the development of

**Abstract \***

The purpose of this study is mapping the available evidence regarding the role of stakeholders in the development of marine tourism through scoping reviews. This study uses a scoping review method that follows the framework according to Arksey and O'Malley, which consists of identifying review questions; seek relevant studies; select relevant studies; map data; discuss, conclude and report the results of the review. Displays the research study search flow using the PRISMA flowchart. The results of this review show that there are 17 articles obtained from the search process. This review identifies the stakeholders as (a) the main/primary stakeholders; the main stakeholders are the parties who are directly affected, either positively or negatively, by a program or project and have a direct interest in the activity. Including the community and communities that act as implementers ; (b) key stakeholders, key stakeholders are parties who have legal authority in making decisions, namely the government as a regulator, coordinator, implementer, and facilitator; (c) supporting /secondary stakeholders, Supporting stakeholders are stakeholders who do not have a direct interest in activities but have a concern, namely the private sector/business people and academics as facilitators, accelerators and drafters as well as the mass media as mediators in the development of marine tourism

**Author's (please separate by semicolon,':') \***  
Ita Prihantika; Rahayu Sulistiowati; Bella Meika

**Upload Paper (.doc/.docx) \***

**Proof of Payment for Publication (image or pdf) \***

**Submit**

Never submit passwords through Google Forms.

This form was created inside of unila.ac.id. [Report Abuse](#)

Google Forms

# LAMPIRAN DRAFT ARTIKEL PROSIDING INTERNASIOANAL

## The role of stakeholders in the development of Indonesia marine tourism: A scoping review

Ita Prihantika<sup>1\*</sup>, Rahayu Sulistiowati<sup>2</sup>, Bella Meika Lestari<sup>3</sup>, Dewie Brima Atika<sup>4</sup> and Tia Panca Rahmadhani<sup>5</sup>

<sup>1</sup> The University of Lampung

<sup>2</sup> The University of Lampung

<sup>3</sup> The University of Lampung

<sup>4</sup> The University of Lampung

<sup>5</sup> The Institute Technology of Sumatera

\* Corresponding Author: Ita Prihantika. Email:

[itaprihantika@fisip.unila.ac.id](mailto:itaprihantika@fisip.unila.ac.id)

### Abstract

The purpose of this study is mapping the available evidence regarding the role of stakeholders in the development of marine tourism through *scoping reviews*. This study uses a *scoping review* method that follows the framework according to Arksey and O'Malley, which consists of identifying review questions; seek relevant studies; select relevant studies; map data; discuss, conclude and report the results of the review. Displays the research study search flow using the PRISMA flowchart. The results of this *review* show that there are 17 articles obtained from the search process. This review identifies the stakeholders as (a) the main/primary stakeholders; the main stakeholders are the parties who are directly affected, either positively or negatively, by a program or project and have a direct interest in the activity. Including the community and communities that act as implementers ; (b) key stakeholders, key stakeholders are parties who have legal authority in making decisions, namely the government as a regulator, coordinator, implementer, and facilitator; (c) supporting /secondary stakeholders, Supporting stakeholders are stakeholders who do not have a direct interest in activities but have a concern, namely the private sector/business people and academics as facilitators, accelerators and drafters as well as the mass media as mediators in the development of marine tourism.

**Keywords:** marine tourism, development, stakeholder

### 1. Introduction

Indonesia is the largest archipelagic state in the world, has 16,671 islands that are rich in potential natural resources, customs, tribes, cultures, and regional

# LAMPIRAN DRAFT ARTIKEL PROSIDING INTERNASIOANAL

languages. A wealth of natural resources and the diversity of cultures that abound make Indonesia has much attractions and can bring in revenue for the state. Indonesia's marine area, which is located on the famous equator line, has a wealth and diversity of natural resources of his, in this case, one of the marine tourism forms of tourism suitable for the developing tourism in Indonesia. According to Djou [5], marine tourism is a form of tourism that explores the beauty of the coastal and marine environment as the main attraction. Marine tourism design is prioritized on view, uniqueness of nature, the characteristics of the ecosystem and combined with the peculiarities of art and culture, and the characteristics of the community as its essential strength.

The tourism sector plays a vital role in the economic development of Indonesia; visible from tourism can be categorized into groups industry the largest of which 8% exports of goods and services derived from tourism. Tourism development can increase the country's foreign exchange earnings and indirectly open up job opportunities for the community to be directly involved in tourism activities. Developing sustainable tourism is closely connected with the involvement of stakeholders. Strengthening the role of stakeholders in tourism development has a long-term impact on economic, ecological, and socio-cultural aspects [4].

Cooperation and contribution of the various role stakeholder in quality tourism products and destinations are easily recognizable images and generate strategic tourism planning that can be in implementing well and brings together all stakeholders involved in direct and indirect tourism. Each stakeholder has a different role that needs to be understood so that the development of tourism objects and attractions in an area can be realized and appropriately implemented. With some of these things, the role of stakeholders is considered necessary in tourism development because, in addition to producing strategic tourism plans that represent many interests, the role of stakeholders can also create an adequate tourism management system to realize sustainable tourism.

The development of marine tourism is still facing problems regarding inadequate infrastructure, low human resources among the community, which causes them not to be able to manage tourist destinations, and others, which are alluded to in several studies and are concluded to be obstacles in tourism development as in the research of Ladia et al. [12]. The marine tourism strategic area development plan is not optimal and directed, the limited resources of the apparatus in the tourism sector. The infrastructure development has not been running smoothly, the provision of facilities is still lacking, the public awareness of tourism and cleanliness is lacking, and the central government and provincial governments are less supportive of financial matters. Meanwhile, in the research of Amalyah et al. [2] the role of stakeholders in the development of marine tourism is in the form of providing infrastructure, developing human resources, empowering local communities, promotion, and CSR (*Corporate Social Responsibility*). The development of marine tourism, the involvement of local communities in the

# LAMPIRAN DRAFT ARTIKEL PROSIDING INTERNASIOANAL

management and as tourism actors are not yet professional, the role of the Local Government is less than optimal, and the lack of coordination from various stakeholders.

Based on the research mentioned above, the development of nautical tourism have a bottleneck in this aspect of the role and cooperation of stakeholders who have been less coordination and synergy, so the attraction management objectives cannot walk in the same direction and get the maximum results in improving the image and the number of tourist visits. In addition to tourism support facilities that still cannot be feasible and good, community participation in tourism activities is also still low. The development of marine tourism requires cooperation between all relevant stakeholders.

## 2. Methods

This research method is scoping review, the method used to identify the literature in-depth and comprehensively obtained from various sources related to the research topic. According to Arksey and O'Malley, *scoping review* consists of five stages: identifying research questions, identify relevant studies, selecting studies, map data, summarize and report the results of studies used in this [7].

### ***Identifying Research Questions***

This review is focused on finding out "The role of stakeholders in the development of marine tourism" in Indonesia, which aims to categorize the literature on the topic and identify key concepts, scoping review gaps, and map the evidence used to inform practices and policies about the role of stakeholders. The research questions used to focus the literature search were:

1. Whom are the stakeholders involved in the development of marine tourism in Indonesia?
2. What are the roles played by stakeholders in the development of marine tourism in Indonesia?
3. In which provinces in Indonesia are research on the role of stakeholders in the development of marine tourism carried out?

To develop the focus of the review and research strategy, the researcher *used the Population, Intervention, Comparison, Outcome, and Study Design* (PICOS) framework to manage and solve the *review's focus*. The focus of the research for articles is qualitative research, so the use of PICO(S) is considered appropriate to help identify key concepts in the review's focus and develop appropriate search terms to describe the problems in this article. The mapping of key concepts using the PICO(S) Framework is as follows:

# LAMPIRAN DRAFT ARTIKEL PROSIDING INTERNASIOANAL

**Table 1. PICO (S) Framework**

<b>Population and Problem</b>	Stakeholders, Stakeholders
<b>Intervention</b>	Marine tourism
<b>Comparison</b>	Development, Utilization, Development
<b>Outcome</b>	Role
<b>Study Design</b>	All articles related to the Role of Stakeholders in the Development of Marine Tourism

Source: Author's own work'

## Identifying Relevant Studies

Identify studies relevant to the research topic taken and use the *Google Scholar* database to index literature related to research, search for literature until it is saturated to maintain the quality of the literature to be taken, and minimize the occurrence of misinformation obtained. The study selection was determined using inclusion and exclusion criteria.

**Table 2. Scoping Review Inclusion and Exclusion Criteria**

Criteria	Inclusion	Exclusion
<b>Population and Problem</b>	Stakeholders who have an interest in the implementation of marine tourism	Parties who have no interest in the implementation of marine tourism
<b>Intervention</b>	Marine Tourism in Indonesia	Maritime Tourism other than in Indonesia
<b>Comparison</b>	Developments carried out in the management of marine tourism	Developments carried out other than in the management of marine tourism
<b>Outcome and Themes</b>	The role played by stakeholders in the development of marine tourism	The role of stakeholders, in addition to the development of marine tourism
<b>Study Design and Publication type</b>	<i>Original articles, qualitative research, randomized control and trial, and articles related to research titles</i>	<i>Article reviews, books, quantitative research and mix method, and articles that are not associated with the research title</i>
<b>Publication years</b>	Posts. 2012 -2021	Pre. 2012 -2021
<b>Language</b>	Indonesian and English	Other languages (besides Indonesian and English)

Source: Author's own work'

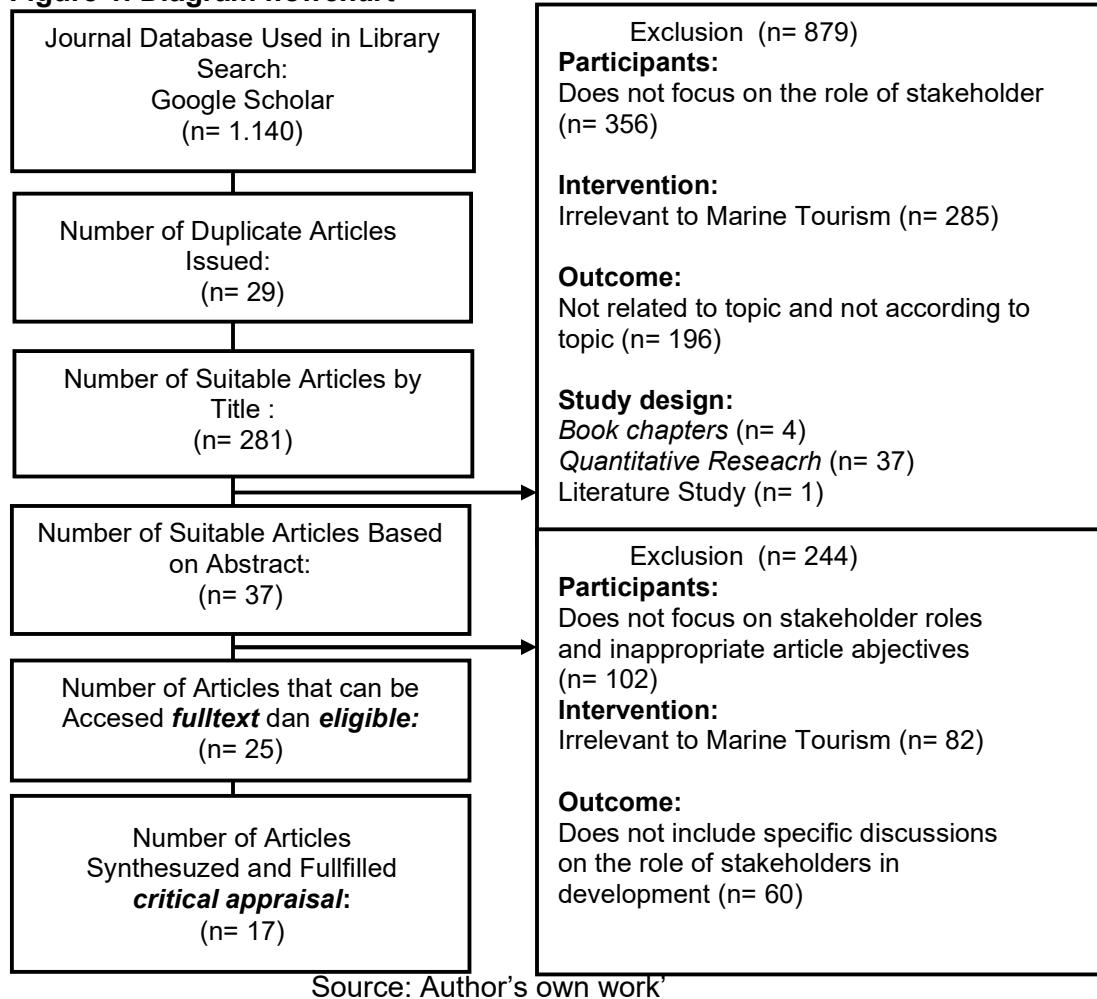
The *keywords* used in the search for articles are Stakeholders AND Marine Tourism AND Development OR Utilization OR Development AND Role of AND All articles related to the Role of Stakeholders in Marine Tourism Development. These *keywords* are used to find articles, journals, and theses related to the researcher's discussion and then selected using PRISMA *Flowchart*.

# LAMPIRAN DRAFT ARTIKEL PROSIDING INTERNASIOANAL

## Study Selection

Based on research results via Google Scholar. By using *keywords* that have been adapted to PICO(S). Obtained 1,140 articles, then after checking the articles, there were 49 duplications, so the articles were excluded, and the remaining 1,091 articles. Then the researcher did skin based on the title ( $n = 281$ ), then the researcher did a filter based on the abstract ( $n = 37$ ) and the full text (25), whose theme was adjusted to the scoping *review* theme. Flowchart diagram, as follows:

**Figure 1. Diagram flowchart**



## 3. Results and Discussion

### Charting Data

Mapping the selected article is the next step to describe the key points based on the findings to answer the research objectives. Articles *review* as many as 17

## **LAMPIRAN DRAFT ARTIKEL PROSIDING INTERNASIOANAL**

articles related to the role of stakeholders in the development of marine tourism in Indonesia. After the studies deemed to fall within the inclusion criteria were pooled together, a summary was developed for each article with several variables, including author, year, research theme, participants, and location. The following is descriptive information on the articles that have been reviewed:

# LAMPIRAN DRAFT ARTIKEL PROSIDING INTERNASIOANAL

Table 3. Charting Data

Theme	Sub Themes	Research Title	Author's name, year
Stakeholder that plays a role in tourism development	1. Government 2. Private 3. Public	The Role of Tourism Stakeholders in the Development of Samalona Island as a Marine Tourism Destination	Reski Amalyah, Djamhur Hamid, Luchman Hakim (2016) [2]
	1. Primary/ main stakeholders 2. Key stakeholders 3. Secondary/ supporting stakeholders	The Role, Interests of Stakeholders and Policy Support in the Development of Maritime Culture-Based Maritime Tourism in Malaumakarta, Sorong Regency	Umi Muawanah, Nendah Kurniasari, Permana Ari Soejarwo, and Christina Yuliaty (2020) [15]
		Analysis of the Role of Stakeholders in the Development of Karang Jahe Beach Tourism Objects in Rembang Regency	Fitri Handayani, Hardi Warsono (2019) [10]
		Community-Based Ecotourism Development and the Role of Stakeholders in Natural Resource Management in Marine Nature Park Marsegu Island, West Seram Regency, Maluku Province	Henderina Lelloltery, Satyawan Pujiatmoko, Chafid Fandelli , and M. Baiquni (2018) [13]
		Stakeholder Analysis in Sustainable Coastal Area Management in Gunungkidul Regency	Riesti Triyanti and Indah Susilowati (2019) [20]
	1. Government 2. Private 3. Academics 4. Society/ Community Community 5. Mass media	Pentahelix Collaboration in Tourism Development Based on Local Wisdom in Merauke Regency	Edoardus E. Maturbongs, Ransta L. Lekatompessy (2020) [14]
		Stakeholder Preferences in the Development of Mangrove Ecotourism at Gunung Anyar Surabaya	Hera Windy Wahyono (2017) [21]
		Analysis of the Role of Stakeholders in the Development of Halal Tourism Destinations on Penyengat Island, Riau Archipelago Province	Riska Destiana, Kismartini, Tri Yuningsih (2020) [4]
	1. Government 2. Private / Entrepreneur 3. Society/ Community Institution Mass media	Conceptual Model of Sustainable Maritime Tourism Development in the Coastal Areas and Small Islands of Makassar City	Rosmawaty Anwar (2014) [3]

## LAMPIRAN DRAFT ARTIKEL PROSIDING INTERNASIOANAL

<p>The Government's role in the development of marine tourism</p>	1. Giving Motivation 2. Provide Training and Education to Tourism Object Managers 3. Tourism Object Development	The Role of the Government in the Development of Yendi Beach Tourism Objects in Yendori Village, Yendori District, Biar Numfor Regency	Djamil Hasim (2020) [9]
	1. Tourism Planning 2. Tourism development 3. Tourism policy 4. Tourism Regulations	The Role of Local Government in the Development of Maritime Tourism Destinations Gili Noko Island Gresik Regency (Study at the Gresik Regency Culture, Tourism, Youth and Sports Office)	Achmad Afandi Sunarti Luchman Hakim (2017) [1]
		The Government of Lalos Village in Developing Batu Proud Beach Tourism Objects	Mohammad Sawir, Hasanuddin H Pende (2020) [21]
	1. Planning of Tourism Development Programs and Activities 2. Provision of Facilities and Infrastructure 3. Travel Promotion	The Role of the Department of Culture and Tourism in the Development of the Triton Bay Tourism Potential, Kaimana Regency, West Papua Province	Fauziah Hanum Ladia, Afifuddin, Agus Zainal Abidin (2020) [12]
	1. Development of Provision of Tourism Facilities 2. Tourism Promotion Development 3. Guidance and Counseling to Communities Around Tourism Objects 4. Tourism Institutional Capacity Development	Community-Based Maritime Tourism Potential Development on Pasaran Island, Bandar Lampung	Tuning Maheasy Noor, Deny Sapto Chondro Utomo, Andrya Yunila Hastuti, Ahmad Habibi, and Mahrus Ali (2021) [16]
		Maritime Tourism Development Efforts on Maratua Island by the Berau Regency Culture and Tourism Office	Ricky Septiwiawan, MZ Arifin, Dini Zulfiani (2020) [19]
	1. Motivator 2. Facilitator 3. Dynamic / Stimulator	The Role of Local Governments in the Development of Tourism Objects on Bokori Island, Konawe Regency	Nurjannah (2019) [17]
		The Role of Local Governments in the Management of Natural Tourist Attractions (Case Study in Oetune Beach, South Central Timor Regency)	Yudha Eka Nugraha, Elisabet Rambu Lika Enga (2021) [18]

Source: Author's own work'

# LAMPIRAN DRAFT ARTIKEL PROSIDING INTERNASIOANAL

## **Geographical Characteristics**

The article reviewed results obtained from the State of Indonesia, namely western Indonesia, received six articles, namely the provinces of the Riau Islands, Lampung, and the provinces of Central Java, Yogyakarta, and East Java. Central Indonesia received five articles covering the provinces of East Kalimantan, South Sulawesi, Southeast Sulawesi, and Central Sulawesi, for the Eastern part of Indonesia received six articles including the provinces of Maluku, NTT, Papua, and West Papua. All seventeen articles were obtained using qualitative research studies.

**Table 4. Characteristics of Research Geography**

No	Research Place	F	%
<b>A. Western Indonesia</b>			
1	Riau Islands – Tanjung Pinang	1	5.8
2	Lampung – Bandar Lampung City	1	5 , 8
3	Central Java – Rembang Regency	1	5 , 8
4	DIY Yogyakarta – Gunung Kidul Regency	1	5 , 8
5	East Java – Gresik Regency	1	5 , 8
6	East Java – Surabaya City	1	5 , 8
<b>B. The middle part of Indonesia</b>			
1	K alimantan East - Berau District	1	5 , 8
2	South Sulawesi – Makassar City	2	11 , 7
3	Southeast Sulawesi – Konawe . Regency	1	5 , 8
4	Central Sulawesi – Tolitoli Regency	1	5.8
<b>C. Eastern Indonesia</b>			
1	Maluku – West Seram Regency	1	5.8
2	East Nusa Tenggara – South Central Timor Regency	1	5.8
3	West Papua – Sorong Regency	1	5.8
4	West Papua – Kaimana Regency	1	5.8
5	Papua – Biak Numfor Regency	1	5.8
6	Papua – Merauke Regency	1	5.8
<b>Amount</b>		17	100

Source: Author's own work'

## **Summarizing and Reporting Findings**

The role is a dynamic aspect of position; if a person performs his rights and obligations according to his position, he has carried out a role [10]. Meanwhile, stakeholders are defined as individuals, groups, or organizations interested in, are involved in, or are influenced by development activities or programs [2]. The role here is the participation of stakeholders in building and developing marine tourism; of course, this review can also be used to collect data about the role of stakeholders in the development of marine tourism.

Based on the results of *the reviews on the related and Berke's interest in the development of travel bahar i* is (a) a significant stakeholder/primer, stakeholder prominent are parties who are directly affected, either positively or negatively, by

# LAMPIRAN DRAFT ARTIKEL PROSIDING INTERNASIOANAL

a program or project as well as having the direct benefit activities, including the community and communities that act as implementers ; (b) the key stakeholders, stakeholder key is the parties who have legal authority in terms of decision making, namely the Government as the regulator, coordinator, and facilitators ; (C) stakeholders supporting / secondary, stakeholder supporters are stakeholders who have no direct interest in the activities but have a concern, i.e., private/businessman and academia as a facilitator, accelerator and drafter [10; 13, 20]. One of the main factors for stakeholder participation in marine tourism development activities is communication and coordination between main, key, and supporting stakeholders who must run optimally and have a target time. All stakeholders must adhere to the principles of marine tourism management by prioritizing the sovereignty of local communities, conservation of natural resources. Natural and cultural resources, which are the main goals in tourism activities. With this, the development of marine tourism can run well and later can have a positive impact on the economy of the local community [15].

## ***Stakeholder Role***

### 1. Government

The Government has a central role in planning, driving, controlling, and supervising the implementation of national development [11]. The development of the tourism sector is an action that has a positive impact to provide opportunities for the community to try and increase the community's income. The existence of regional autonomy is also able to play a regional role in opening up opportunities for advancing their region by identifying and managing sources that have the potential to increase original regional income because the size of regional income dramatically affects the success of the implementation of autonomy [9]

Local governments are expected to be involved in the development of marine tourism, which has a role in tourism, culture, and art affairs; planning tourism development should be at the bunk in the Strategic Plan (Plan); providers of access and infrastructure related to tourism; facilitate industry and trade; enforcing regulations and controlling the area around tourist attractions. The Government is also involved in the implementation to determine various specific regulations in the development of marine tourism and carrying out the role of providing budgets and supervising the sustainability of maritime tourism development, *legislation, budgeting, and controlling* [14]. Government (departments or technical institutes) as key stakeholders in implementing public policies capable of coordination with other stakeholders, accommodating facilities and infrastructure supporting maritime tourism. To provide guidance and counseling to society like attraction manager to improve the ability of local community; and tourism promotion, like cooperation with specific- community and make the event and utilize digital technology to introduce the attractions [19].

# **LAMPIRAN DRAFT ARTIKEL PROSIDING INTERNASIOANAL**

## **2. Private/Business**

Involving the private sector as a business developer in the marine tourism sector is also very important. It is considering that the provision of facilities and the implementation of development cannot only rely on the role of the Government. To develop marine tourism, the private sector is expected to contribute to various marine tourism development programs significantly. Party business as a manager/caretaker businesses marine tourism will be an instrumental motivator and facilitator. The private sector/ businessman should be encouraged and allowed to participate in various marine tourism development program plans that will be implemented. The role of the private sector is mainly as an investor in the various program plans that have been set. The involvement of the private sector will create a conducive marine tourism business climate and develop local community businesses to lift the economy of the community around the area [3].

The involvement and cooperation of the entrepreneur will contribute significantly to the achievement of the target, as expected. Coupled with the influence of social media that makes it easier to promote tourist areas that open up opportunities for local people to do business and indirectly open new job opportunities for the tourist area community, business products that can be developed in the form of services provided to consumers, such as tourist attraction as the main product offered (a travel agency provider in promoting tourism by making tour packages); transportation (tour & travel, airline ticket providers, vehicle rental/transportation providers); tour guides (business owners can employ people around tourist objects to become tour guides); accommodation or lodging; culinary business; photography services with beautiful spots on tourist objects, as well as services or products tailored to the needs and desires of tourists.

## **3. Academics**

Capacity academics are formed learners to think critically, developing talent and product knowledge and skills that can be applied to social life. In addition, academics are also drafters who can help tourism managers through research carried out and shape communities through the provision of skilled labor so that people's economic knowledge can develop [8]. The role of academics in the development of marine tourism is not only through research but also helps increase the capacity of knowledge and skills/skills of tourism managers and local communities based on concepts, theories, strategies, and models of marine tourism development that are relevant to the needs and conditions of marine tourism potential and of course to increase business opportunities for local communities. Academic involvement is expected can provide a positive value for the development of marine tourism, and academics can also contribute to the evaluation of programs of regional development and regional planning in synergy with the community related to the development of tourism; and indirectly help provide the pieces of training development and contribution ideas in the process of management of marine tourism [4].

# LAMPIRAN DRAFT ARTIKEL PROSIDING INTERNASIOANAL

## 4. Community

Social communities are defined as local communities that form a group, or customary law communities as owners of "ulayat" rights, as well as groups, formed such as local arts councils, non-governmental organizations (NGOs), or groups based on interests or hobbies, which aim to explore or promote tourism in the area [14]. The community has an essential role both as a facilitator or community companion and as a motivator and facilitator for all inputs and information on development strategies and policies. The local community must play an active role in every activity, starting with the initiation and acceleration of marine tourism development.

The community that was established not only to introduce the tour alone but also-groups have a role in preserving the culture and maintaining the ecosystem of natural resources associated with tourism potential that the development of tourism nautical not only the welfare of the community's economy. They could preserve and introduce the local culture and provide ideas, ideas, and input to potential sectors that act as drivers of other sectors and communities. Community is such Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) where this community as one of the driving elements in supporting creating a conducive environment and atmosphere. Those are a concern in developing tourism in the area; a community that facilitates the interests of fishers, tourism actors, and the local community as a whole with stakeholders to improve the welfare of the marine tourism area community; local arts councils, NGOs, or groups based on interests or hobbies, which aim to explore or promote tourism in the area. And also groups or communities such as bloggers, photography, and other communities [20].

## 5. Society

The society is one of the stakeholders, has a significant role in tourism development—the role of the society, starting from planning to implementing tourism development in the region. The concept of *Community-Based Tourism* (CBT) tries to explain the role of society in tourism, which is placed as the leading actor through empowerment so that the priority of tourism benefits is intended as much as possible for the welfare of the local community [10]. Society prioritize involvement in every marine tourism development activity, starting from the planning, implementation, monitoring, and evaluation processes. This is expected to achieve targets in an efficient and participatory manner. Society is expected to consist of village officials, the Village Representative Body (BPK), community leaders, fishers, traders, tourism actors, and women's organizations [3]. The role of society's tourism manager; open supporting business travel activities such as lodging, shop, cafeteria, diving equipment rental, rest areas, and banana boat; and become a *guide* for tourists who want to snorkel and dive [2]. Community participation in every marine tourism development activity is expected to generate a sense of ownership and responsibility for all the results of marine tourism development.

# LAMPIRAN DRAFT ARTIKEL PROSIDING INTERNASIOANAL

## 6. Mass media

The media also plays a role as an intermediary in delivering information between stakeholders to coordinate the implementation of the development of marine tourism. The mass media becomes a mediator whose role is to support publications in promoting tourism products and services—the Media's capability to spread disseminated information that is utilized in the tourism sector. Continue to promote the area attractions can attract tourists wan domestically and abroad. The choice of tourist destinations depends on the information obtained from the mass media. The development of a good and attractive image for tourist destinations through the mass media will be a driving force for the interest of potential tourists to visit. Tourism development and mass media refer to all activities such as skills development, job creation, and marketing of tourism products through various mass media channels to find out about their tourism potential [6].

Stakeholders have roles and responsibilities in implementing the development of marine tourism, such as the Government in this case as a regulator and facilitator who is most responsible for implementing marine tourism policies and has involvement in building communication and coordination with other actors, namely academics, private parties/business people, communities. Society and local communities as an actor who complements to achieve success in the development of marine tourism. Collaboration between stakeholders in the development of tourist marine based on the results of *the reviews* can be described can be as shown below:

**Figure 2. Stakeholder Collaboration in Marine Tourism Development**



# LAMPIRAN DRAFT ARTIKEL PROSIDING INTERNASIOANAL

## 4. Conclusion

Based on this review, the results of stakeholder identification show that each stakeholder still carries out its functions and roles separately, both key stakeholders, primary stakeholders, and supporting/secondary stakeholders. For this reason, collaboration and coordination between stakeholders are needed by carrying out collaborative management by integrating all stakeholders involved, including local communities, community communities, Government, private sector/business people, and academics.

Collaboration built with inter-stakeholder linkages in the development of marine tourism starts from the planning stage to the development of sustainable tourism. The role of each stakeholder is always to try to do the best for tourism development that impacts the community. The involvement of the local community is an effort to maintain the culture and natural resources that already exist in the life of the local community. Optimizing collaboration in the development of marine tourism can be done by increasing coordination and collaboration between stakeholders involved, strengthening institutional capacity for the service and technical institutions that have a role in the development and promotion of marine tourism.

It requires the proper guidance and dissemination to the public regularly to the concept of the development of nautical tourism, which is, of course, the development of tourism proficiency level in line with the conditions of the tourism potential, so that people become aware and active pitch Engaged in marine tourism activities and community has the ability and knowledge to manage marine tourism. Furthermore, the support of all stakeholders is needed to increase marine tourism development activities for the community's welfare.

## Acknowledgement

The authosr would like to thank the Institute for Research and Community Service, University of Lampung for granting the Penelitian Dasar year 2021.

## References

- [1]. Afandi, A., Sunarti, S., & Hakim, L. (2017). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Bahari Pulau Gili Noko Kabupaten Gresik (Studi Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Gresik). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 49(1), 116-121.
- [2]. Amalyah, R., Hamid, D., & Hakim, L. (2016). Peran stakeholder pariwisata dalam pengembangan Pulau Samalona sebagai destinasi wisata bahari. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 37(1), 158-163.
- [3]. Anwar, R. (2014). Model Konseptual Pengembangan Wisata Bahari Secara Berkelanjutan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Makassar. *Journal of Tourism Destination and Attraction*, 2(1), 15-26.

# LAMPIRAN DRAFT ARTIKEL PROSIDING INTERNASIOANAL

- [4]. Destiana, R., Kismartini, K., & Yuningsih, T. (2020). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(2), 132-153.
- [5]. Djou, J. A. G. (2013). Pengembangan 24 Destinasi Wisata Bahari Kabupaten Ende. *Jurnal Kawistara*, 3(1). doi:<http://dx.doi.org/10.22146/kawistara.3958>.
- [6]. Enemuo, O. B. and Amaechi, B. (2015). The Role of Mass Media in Tourism Development in Abia State Journal of Tourism, Hospitality and Sports. 11(2015).
- [7]. Farwati, R., Metafisika, K., Sari, I., Sitinjak, D.S., Solikha, D.S., and Solfarina (2021). STEM Education Implementation In Indonesia: A Scoping Review. International Journal of STEM Education For Sustainability, 1(1). DOI: <https://doi.org/10.53889/ijses.v1i1.2>
- [8]. Halibas, Alrence Santiago; Sibayan, Rowena Ocier; Maata, Rolou Lyn Rodriguez . (2017). The Penta Helix Model ff Innovation in Oman: An Hei Perspective. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge & Management. 12, p. 159-174.
- [9]. Hasim, D. (2020). Peran Pemerintah dalam Pengembangan Objek Wisata Yendi Beach pada Kampung Yendidori Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor. *Sosio e-Kons*, 12(02), 138-149. [https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio\\_ekons/article/view/5124](https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons/article/view/5124)
- [10]. Handayani, F., & Warsono, H. (2017). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(3), 40-53.
- [11]. Labaran, M. A., Hakim, L. & Hard, R. (2014). Peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Masyarakat Petani Kakao di Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju, 4(1). DOI: <https://doi.org/10.26618/ojip.v4i1.80>.
- [12]. Ladia, F. H., Afifuddin, A., & Abidin, A. Z. (2020). Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan potensi wisata Teluk Triton kabupaten Kaimana provinsi Papua Barat. *Respon Publik*, 14(1), 72-89.
- [13]. Lelloltery, H., Pujiatmoko, S., Fandelli, C., & Baiquni, M. PENGEMBANGAN EKOWISATA BAHARI BERBASIS MASYARAKAT DAN PERAN STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DI TAMAN WISATA ALAM LAUT PULAU MARSEGUKABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PROPINSI MALUKU. *Jurnal Hutan Tropis*, 6(3), 302-314.
- [14]. Maturbongs, E. E., & Lekatompessy, R. L. (2020). Kolaborasi Pentahelix dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Merauke. *Sumber*, 81, 59.
- [15]. Muawanah, U., Kurniasari, N., Soejarwo, P. A., & Yuliaty, C. (2020). PERAN, KEPENTINGAN STAKEHOLDER DAN DUKUNGAN KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BAHARI BERBASIS BUDAYA BAHARI DI MALAUMKARTA, KABUPATEN SORONG. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 10(2), 157-168.
- [16]. Noor, N. M., Utomo, D. S. C., Hastuti, A. Y., Habibi, A., & Ali, M. (2021). PENGEMBANGAN POTENSI WISATA BAHARI BERBASIS MASYARAKAT

# LAMPIRAN DRAFT ARTIKEL PROSIDING INTERNASIOANAL

- DI PULAU PASARAN, BANDAR LAMPUNG. *Inovasi Pembangunan-Jurnal Kelitbangan*, 9(1), 103-114.
- [17]. Nurjannah, N. (2019). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Objek Wisata di Pulau Bokori Kabupaten Konawe. *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*, 4(1).
- [18]. Nugraha, Y. E. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Alam di Kabupaten TTS: Studi Kasus Daya Tarik Wisata Pantai Oetune. *Media Wisata*, 19(1).
- [19]. Septiwirawan, R, Arifin, M.Z., Dini Z., (2020) Upaya Pengembangan Wisata Bahari di Pulau Maratua oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. *eJournal Administrasi Publik*, 2020, 8 (3): 9290-9302.
- [20]. Triyanti, R., & Susilowati, I. (2019). ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR BERKELANJUTAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 9(1), 23-34. <http://ejurnal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse/article/view/7324>
- [21]. Sawir, M. (2020). PERAN PEMERINTAH DESA LALOS DALAM MENGEMBANGKAN OBYEK WISATA PANTAI BATU BANGGA. *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 2(1). [https://ojs.umada.ac.id/index.php/Tolis\\_Ilmiah/article/view/93](https://ojs.umada.ac.id/index.php/Tolis_Ilmiah/article/view/93)
- [22]. Wahyono, Hera Windy (2017) *Preferensi Stakeholder dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove Gunung Anyar Surabaya*. Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.